

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 1999 DAN 2004 DI KABUPATEN KLATEN**

Studi Kasus Pada DPD Partai GOLKAR Di Klaten

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

SRI LESTARI

NIM : 001314032



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

SKRIPSI

**PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM 1999 DAN
2004 DI KABUPATEN KLATEN**

Studi Kasus Pada DPD Partai GOLKAR Di Klaten

Oleh :

SRI LESTARI

001314032

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.

Tanggal 14 Oktober 2004

SKRIPSI

**PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM 1999 DAN
2004 DI KABUPATEN KLATEN**

Studi Kasus Pada DPD Partai GOLKAR Di Klaten

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Sri Lestari

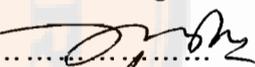
001314032

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal, 22 Oktober 2004

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd	

Yogyakarta, 22 Oktober 2004

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Samet Soewandi, M.Pd.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kau memperoleh kekuatan, keberanian dan rasa percaya diri dari setiap pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak untuk menghadapi rasa takutmu. Kau dapat berkata pada dirimu sendiri, “aku telah tabah menghadapi kengerian ini, aku pasti mampu menghadapi hal berikutnya”.

(Eleanor Roosevelt)

*Semua yang telah kutulis kupersembahkan kepada
Bapak dan Ibu tercinta*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

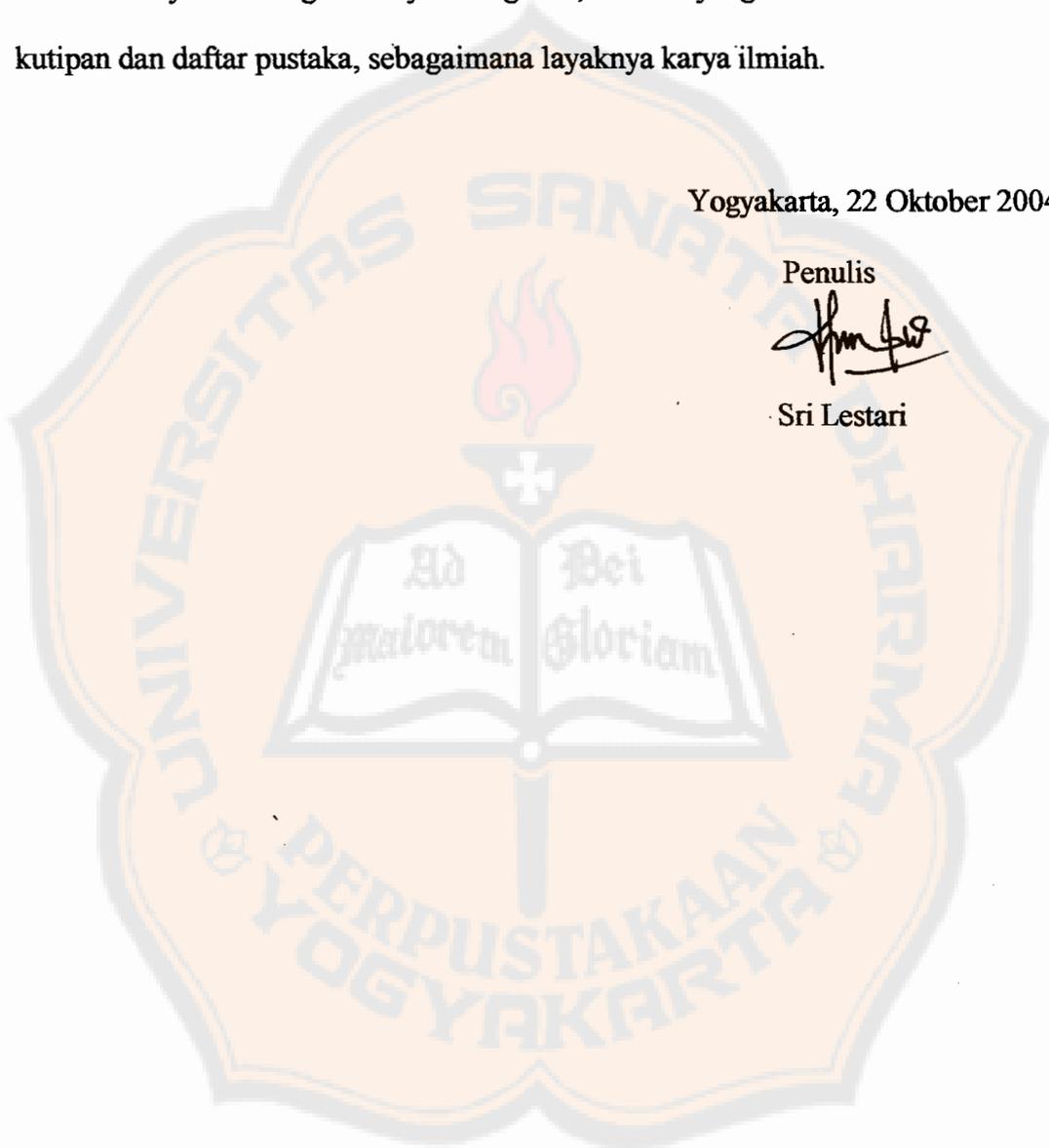
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Oktober 2004

Penulis



Sri Lestari



ABSTRAK

**Oleh : Sri Lestari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta**

Skripsi ini berjudul Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten, tujuan penelitian ini untuk (1) Menjelaskan sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Klaten. (2) Membandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasar UU Pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003. (3) Menjelaskan perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004. (4) Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan sifat penulisan deskriptif analitis yang mencakup 5 tahap yaitu : studi kepustakaan, wawancara, kritik sumber, interpretasi, penulisan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan politik.

Hasil penelitian ini secara garis besar adalah : pertama, Partai GOLKAR adalah salah satu partai yang merupakan federasi berbagai golongan kekaryaan yang dibentuk dalam menghadapi eksistensi Partai Komunis Indonesia. Partai GOLKAR terbentuk tanggal 20 Oktober 1964 yang diberi nama SEKBER GOLKAR. Setelah pemilu tahun 1971 SEKBER GOLKAR diubah menjadi GOLKAR dan sejak berakhirnya Orde Baru yaitu tahun 1998 GOLKAR berubah menjadi Partai GOLKAR. SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten berdiri tahun 1964 yaitu setelah diresmikannya SEKBER GOLKAR di Pusat.

Kedua, persamaan UU Pemilu No.3/1999 dan UU No.12/2003 adalah mengenai sistem pemilu untuk memilih anggota DPRD yaitu sistem proporsional, daerah pemilihan dan jumlah kursi, hak memilih dan juga pelaksanaan kampanye sedangkan perbedaannya untuk pemilu tahun 2004 sistem pemilihan untuk memilih anggota DPD dengan sistem distrik, perbedaan yang lain adalah mengenai lembaga yang dipilih, pendaftaran pemilih, penyelenggaraan pemilu, penetapan hasil pemilu, dan partai politik peserta pemilu.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan Partai GOLKAR mengalami kenaikan jumlah suara dalam pemilu 2004 sebesar 17,01% dari jumlah pemilih sebanyak 745.626 orang dibandingkan perolehan suara tahun 1999 sebesar 12,07% dari jumlah pemilih sebanyak 742.213 orang.

Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi suara Partai GOLKAR dalam pemilu 1999 dan 2004 antara lain : keadaan geografi, kondisi sosial masyarakat, ekonomi, budaya di Kabupaten Klaten. Faktor yang menghambat perolehan suara partai GOLKAR adalah konsolidasi partai yang belum tuntas, keterbatasan sumber dana, adanya stigma bahwa Partai GOLKAR adalah partainya Orde Baru yang menyebabkan krisis di Indonesia dan kekecewaan masyarakat terhadap perilaku penguasa Orde Baru yang arogan.

ABSTRACT

**Sri lestari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta**

Thesis that the title is GOLKAR party in the 1999 and 2004 general election in Kabupaten Klaten, the goal of the research is (1) To explain the history of GOLKAR party in Klaten. (2) To compare the execution of general election 1999 and 2004 based on the act general election No 3/1999 and the act general election No 12/2003. (3) To explain the voice result of GOLKAR party in Kabupaten Klaten in general election 1999 and 2004 (4) To describe the factors that influence the voice result of GOLKAR party in general election 1999 and 2004 in Kabupaten Klaten.

The method used in the research is history method by analitic descriptive writing that includes 5 steps. They are : Literature study, interview, the critical of the material, interpretation, writing, the approximation used in the observation is social and politic approximation.

The observation result is : first, GOLKAR Party is one of party that is the federation of Golongan , kekaryaan farmed in order to face the existantion of PKI. GOLKAR Party that is farmed on October 20, 1964 named SEKBER GOLKAR. After general election 1971 SEKBER GOLKAR changed to be GOLKAR changed to be GOLKAR Party. SEKBER GOLKAR in Kabupaten Klaten was built in 1964 after legalised in the top.

Second, the similarity of the act general election No 3/1999 and the act No 12/2003 is general election system to choose DPRD member, they are proporsional system, election district, and seat total, choosing right and so, the execution of promotion. Whereas, the difference between the both is the system of DPD member choice is district system, the other distinctions are about the institution to be choosed, elector registration general election execution, general election result establishment, and politic party that fellow in general election.

Third, the result of the research is that GOLKAR Party underment the rising of account in general election 2004 in the percentage of 17,01% from 745,626 general election executors compared with the voice result in general election 1999 in the precentage of 12,07% from 742,213 general election executors.

Fourth, the factors that influence the voice of GOLKAR Party in general election 1999 and 2004 are: Geograpical coudition, society social condition, economic, the cultural in Kabupaten Klaten. The factors that abstract the result voice of Partai GOLKAR are the consolidation of Party that is not finish yet, the limitation of fund resource, and the stigma that GOLKAR Party is the party of ORBA that caused crisis in Indonesian and disappointment of the society on the attitude of the government of ORBA that is arogan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala cinta dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul *Partai Golongan Karya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten* merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Drs. Adisusilo J.R selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan saran bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Endang selaku Ketua BAPEDA Klaten atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Bapak K. Subagyo selaku Ketua DPD Partai GOLKAR yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ketua KPU dan Kesbanglinmas yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Bapak dan Ibu terhormat, yang telah memberi segenap cinta dan dukungan kepada penulis selama hidup. Saudara tercinta, Dwi, Sigit, Desy, serta keponakanku Dwiex, Mila.
8. Mas Ari, Mas Antok, Mas Ekak, Mas Nur, temenku Budi, Endar, Porcas.
9. Mas Yani makasih udah banyak bantu aku hingga akhir skripsi ini.
10. Bapak Dedhari Sutrasno, Pak Y. Soetopo, Pak Heru, Pak Arjo, Bapak F.X Setyawan, Mbak Endah dan seluruh anggota DPD Partai GOLKAR yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga GK 17 dan GK 16 Mbak Anas, Mbak Eta, Anna, Mbak Krist, Mbak Liest, Mbak Yeyen, Kaka, Ndunk, Maria, She's Gone, Dewi, Mbak Kissme, Irin, Mbak Yuni, Tian, Mas Arko "Krithing", Ivan, Tom-Pels, Mas Roy-Retno-Revel atas kebersamaannya.
12. Semua teman-temanku di Pendidikan Sejarah terimakasih atas kebersamaan kita selama ini.

Penulis menyadari keterbatasan dalam penulisan ini dan mengakui bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, baik ketelitian, kedalaman analisis maupun cara penulisan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi perbaikan penulisan ini, terima kasih.

Yogyakarta, 22 Oktober 2024

Penulis

Sri Lestari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	7
F. Metode dan Pendekatan Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	20



BAB II	: SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI GOLKAR DI	
	KLATEN	22
A.	Sejarah Terbentuknya Partai GOLKAR di Pusat	22
1.	Sejarah Berdirinya Partai GOLKAR	22
2.	Posisi dan Peran GOLKAR di Masa Orde Baru	27
3.	Perkembangan Partai GOLKAR di Era Reformasi	29
B.	Sejarah Terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten	37
1.	Sejarah Berdirinya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten	37
2.	Perkembangan Partai GOLKAR Tahun 1964-2004 di Kabupaten Klaten	40
C.	Keanggotaan Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004	44
BAB III	: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN UU PEMILU NO.3 TAHUN	
	1999 DAN UU PEMILU NO.12 TAHUN 2003.	46
A.	Persamaan UU Pemilu No.3/1999 dan UU Pemilu No.12/2003	49
B.	Perbedaan UU No.3/1999 dan UU No.12/2003 tentang Pemilu	52
C.	Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Pemilu Berdasarkan UU No.3/1999 dan UU No.12/2003 di Kabupaten Klaten	64

BAB IV : PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 DAN 2004	69
A. Partai GOLKAR Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum tahun 1999	69
1. Persiapan	69
2. Tahap Kampanye.....	71
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara tahun 1999	73
4. Penetapan Hasil Pemilu tahun 1999.....	75
B. Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum tahun 2004	76
1. Persiapan	76
2. Tahap Kampanye.....	79
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara tahun 2004	80
4. Penetapan Hasil Pemilu tahun 2004.....	83
C. Perbedaan tahap persiapan dan kampanye pada pemilu tahun 1999 dan 2004	87
D. Perbandingan Partai GOLKAR Kabupaten Klaten Dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004.....	89
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten pada pemilu tahun 1999 dan 2004	92
BAB V : KESIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi. Menurut GBHN 1983 pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan oleh presiden/mandataris MPR dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilu¹. Dalam pelaksanaan pemilu paling tidak ada dua kegiatan utama yaitu kegiatan kampanye untuk memperoleh pendukung dan kegiatan pemberian suara yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih.

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme politik untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih akan membawakan aspirasi rakyat dalam membangun dan mempertahankan negara Indonesia².

Di Indonesia pemilihan umum telah dilaksanakan 9 kali yaitu satu kali pada masa demokrasi liberal atau parlementer, enam kali pada masa Orde Baru, dan setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, pemilu di Indonesia sudah

¹ Afan Gafar, dkk, *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), 1993, hlm. 46.

² J. Kristiadi, dkk, *Pemilihan Umum 1997 (Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi)*, Jakarta : CSIS, 1997, hlm.2.

dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dan 5 April 2004. Pemilu pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai, sedangkan pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik.

Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum³. Tujuannya adalah untuk memilih wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Salah satu partai politik yang pada zaman Orde Baru selalu memenangkan pemilu adalah GOLKAR. Hadirnya GOLKAR dalam sistem politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prakondisi yang mengawalinya sejak tahun-tahun akhir dekade 50-an. Sebagaimana diketahui bahwa awal munculnya GOLKAR dapat diketahui ketika kekuasaan politik makin terpusat ditangan Bung Karno dan makin meluasnya dominasi PKI dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masa awal Orde Baru Sekber GOLKAR tumbuh dan berkembang terus bersama-sama eksponen-eksponen Orde Baru lainnya yang memelopori pembaharuan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Memasuki pemilu pertama pada masa Orde Baru yang diselenggarakan tanggal 3 Juli 1971, Sekber GOLKAR ikut serta sebagai peserta pemilu bersaing dengan sembilan partai politik lainnya yaitu PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, NU, Parmusi, PSII, dan Perti⁴. Dari hasil penghitungan suara ternyata Sekber GOLKAR berhasil meraih kemenangan.

³ Undang-Undang Pemilu No.2 *Tentang Partai Politik*, 1999, hlm.3.

⁴ Ridwan Saidi, *Golkar Pasca Pemilu 1992*, Jakarta : PT. Gramedia Widia Aksara Indonesia, 1993, hlm. 7-8.

Maka sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengkonsolidasikan dirinya menjadi Golongan Karya.

Pada pemilu 1977 yang merupakan pemilu kedua dalam masa Orde Baru Golongan Karya kembali tampil dengan dua peserta baru sebagai hasil fusi dan penyederhanaan partai pada tahun 1973. Partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, sedangkan Perti, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Murba berfusi kedalam Partai Demokrasi Indonesia. Dalam pemilu ini GOLKAR sebagai peserta yang sudah berpengalaman dibanding PPP dan PDI berhasil memenangkan pemilu.

Dalam pemilu berikutnya yaitu tahun 1982 sampai tahun 1997 GOLKAR secara terus menerus dapat mempertahankan kemenangannya. Pemilu tahun 1997 merupakan pemilu yang diharapkan dapat menyelamatkan bangsa dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, namun ternyata hasil pemilu itu menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak suka atas pemerintahan Orde Baru karena dirasa tidak dapat menyelamatkan bangsa dari kemiskinan. Pada tahun 1997 sampai tahun 1998 banyak sekali terjadi demonstrasi yang merupakan gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Gerakan reformasi itu merupakan suatu perubahan politik nasional yang tidak dapat dihindarkan dengan berbagai dampak yang menyertainya. Puncak dari reformasi ditandai dengan pengunduran diri Jendral Besar

Soeharto sebagai Presiden RI. Perubahan yang begitu cepat telah ikut mendorong GOLKAR melakukan langkah-langkah reformasi.

Proses reformasi telah melahirkan kenyataan baru yaitu berubahnya GOLKAR menjadi senyatanya. Sesuai dengan semangat reformasi maka GOLKAR melakukan berbagai pembaharuan dalam tubuh organisasinya. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang berlangsung 9-11 Juli 1998, sebagai sikap responsif terhadap reformasi dan tuntutan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hak-hak asasi manusia, serta pemerataan pembangunan, GOLKAR mengadakan pembaharuan dalam AD/ART, program, dan paradigma GOLKAR. Penetapan GOLKAR sebagai partai dalam MUNASLUB sejalan dengan lahirnya UU No. 2 tentang partai politik.

Penataan organisasi dan konsolidasi GOLKAR secara cermat ternyata menghasilkan perolehan suara yang cukup terhormat dalam pemilu 1999, kendati di bawah hujatan dan tiadanya lagi dukungan PNS dan ABRI. Berbagai prestasi yang telah diraih Partai GOLKAR membuat sekelompok orang berusaha untuk menghancurkan Partai GOLKAR. Hal ini terlihat pada gerakan-gerakan pembubaran dan pembakaran Kantor DPD Partai GOLKAR oleh sekelompok orang. Banyak orang berpendapat bahwa Partai GOLKAR merupakan warisan Orde Baru dan menuntut agar Partai GOLKAR dibubarkan. Pada tanggal 31 Juli 2001 Mahkamah Agung (MA) telah menolak tuntutan pembubaran Partai GOLKAR yang diajukan oleh sekelompok LSM

yang anti Partai GOLKAR karena MA menganggap pembubaran Partai GOLKAR tidak sejalan dengan UU No. 2 tentang partai politik.

Peristiwa dan kejadian di atas membuat Partai GOLKAR mawas diri dan mau bercermin dari masa lalu karena harus diakui bahwa selama ini telah terjadi hubungan antara birokrasi dan partai sehingga di satu sisi GOLKAR memanfaatkan fasilitas birokrasi dan di sisi lain GOLKAR juga terlibat dengan perilaku pemerintah Orde Baru yang penuh KKN. Selain ikut mendapat serangan yang gencar dari pers tentang perilaku GOLKAR masa lalu, harus diakui bahwa secara internal GOLKAR dininabobokkan oleh perilaku birokrasi yang cenderung lamban, tidak efisien, dan tidak produktif. Tampak juga adanya gejala memudarnya pemahaman ideologi dan misi GOLKAR sehingga sangat mengkhawatirkan jika GOLKAR harus berhadapan dengan partai-partai lain yang militan.

Ketidaksiplinan dalam menghadapi era yang sedang berubah ini bisa berakibat fatal, artinya di saat demokrasi telah dibuka seluas-luasnya, namun perilaku GOLKAR masih juga mengandalkan birokrasi pemerintah yang tidak terlalu bisa diharapkan. Dengan melihat kenyataan tersebut tentu saja GOLKAR perlu menampilkan wajah baru, semangat dan visi baru sebagai sebuah partai yang dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat tetap mendapat simpati massa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Partai GOLKAR dalam pemilihan umum 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk

memperjelas dan melengkapi berbagai hal tentang Partai GOLKAR untuk memperoleh suara dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 sehingga dapat menambah pengetahuan perpolitikan di Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Klaten ?
2. Bagaimana perbandingan UU Pemilu No. 3 tahun 1999 dan UU Pemilu No. 12 tahun 2003?
3. Bagaimana perolehan suara Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 ?
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perolehan suara partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Pusat dan di Kabupaten Klaten.
2. Membandingkan UU Pemilu No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003.
3. Menjelaskan perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004.

4. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu 1999 dan 2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu sejarah, hasil penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah penulisan sejarah politik di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Klaten pada khususnya.
2. Bagi Partai GOLKAR, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi pemilihan umum 2009.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan politik, khususnya tentang Partai GOLKAR dalam pemilihan umum periode 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.

E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Beberapa sumber tertulis yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain :

Pertama, *AD/ART Partai Golongan Karya tahun 1998-2004*, yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang peraturan-peraturan partai. Dokumen ini digunakan untuk membahas sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

Kedua, *Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten masa bakti 1998-2004*, yang berisi tentang

laporan pertanggungjawaban dari para pengurus Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten. Dokumen ini digunakan untuk membahas sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

Ketiga, Dokumen *Hasil Konferensi Partai GOLKAR 1998*, yang berisi tentang susunan pengurus DPD Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten. Dokumen ini digunakan untuk membahas sejarah terbentuknya Partai Golongan Karya di Kabupaten Klaten.

Keempat, Dokumen *Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Paripurna IV Partai GOLKAR tahun 2000*, berisi tentang sikap politik yang dikemukakan oleh pimpinan pusat Partai GOLKAR tentang situasi politik yang terjadi di Indonesia. Dokumen ini digunakan untuk membahas sejarah terbentuknya partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

Kelima, Dokumen *Hasil Rapat Kerja Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 2003*, dokumen ini digunakan untuk membahas sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

Keenam, Dokumen Panitia Pemilihan Umum Daerah tingkat II Kabupaten Klaten tentang *Data Perolehan Suara 1999 dan 2004*. Dokumen ini digunakan untuk membahas hasil perolehan suara pemilu 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.

Ketujuh, Dokumen *UU Pemilu No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003*, dokumen ini digunakan untuk membahas tentang perbandingan antara UU Pemilu tahun 1999 dan 2004.

Kedelapan, Dokumen *Evaluasi Pemilu 1999 dan 2004 Partai GOLKAR Kabupaten Klaten*. Dokumen ini digunakan untuk membahas faktor pendukung dan penghambat perkembangan Partai GOLKAR dalam pemilihan umum 1999 dan 2004.

2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep mengenai demokrasi, partai politik, pemilihan umum dan Partai GOLKAR.

a. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos*, yang artinya rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Perumusan paling umum mengenai demokrasi adalah suatu keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas⁵.

Pada saat ini aspirasi demokrasi menjadi aspirasi umat manusia secara universal, tidak terkecuali dalam masyarakat Indonesia. Demokrasi itu sendiri pada hakekatnya adalah proses yang terus menerus untuk mencapai masyarakat yang terbuka, partisipatoris dan berkeadilan⁶. Rakyat Indonesia pada hakekatnya adalah rakyat yang bermental terbuka dan mudah menerima hal-hal yang positif dari manapun datangnya.

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia, 1977, hlm. 69.

⁶ Afan Gafar, *op. cit*, hlm. xv

b. Partai Politik

Menurut Miriam Budiarto, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka⁷.

Partai politik sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan rakyat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan kesadaran politik pada khususnya. Partai politik merupakan alat utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat sehingga aspirasi rakyat dapat tersalurkan dalam suatu arus yang teratur. Di samping itu partai politik juga berfungsi untuk memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan keamanan bangsa.

Partai politik adalah organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda⁸. Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan masyarakat politik yang luas.

Di Indonesia, lahirnya partai politik telah dimulai sejak masa penjajahan di awal abad ke-20. Partai politik yang lahir di masa itu memiliki tiga aliran

⁷ Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 14.

⁸ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang-Surut)*, Jakarta : Rajawali, 1983, hlm. 32.

politik utama yaitu Islam, Nasionalis, dan Sosialis/Marxis. Parpol yang pertama lahir adalah parpol beraliran Islam yaitu Syarikat Islam (SI) pada tahun 1912 yang dipimpin oleh Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto. Berturut-turut kemudian lahir Indische Partij (IP) tahun 1912, Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1920 yang beraliran Marxisme/Komunisme, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang beraliran nasionalis. Setelah itu lahir pula beberapa partai lain seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Parindra (Partai Indonesia Raya) yang disusul dengan kelahiran partai-partai lain yang bercorak kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan, Serikat Ambon, Serikat Sumatra, Kaum Betawi, Rukun Minahasa dll.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, kelahiran partai politik makin banyak dengan dikeluarkannya Maklumat pemerintah No. X tanggal 3 November 1945⁹. Maklumat tersebut dikeluarkan untuk menghapus kesan bahwa Indonesia adalah negara fasis bentukan Jepang. Sejak itu berdiri berbagai partai politik berdasar agama baik Islam maupun Kristen/Katholik dan agama lain, misalnya Masyumi, PSII, Perti, NU, Partindo, dan Partai Katholik. Kemudian lahir pula berbagai parpol berdasar kebangsaan misalnya PNI, PI, dll. Selain itu muncul juga partai dengan dasar Marxisme/komunisme dan sosialisme antara lain PKI, Partai Murba dan Partai Buruh.

Pada tahun 1950, sistem pemerintahan presidensiil berdasar UUD 1945 berubah menjadi sistem parlementer berdasar UUD Sementara tahun 1950. Dalam pemilu pertama tahun 1955 muncul empat partai besar yang memiliki

⁹ Ridwan Saidi, *op. cit*, hlm. 1.

tiga aliran politik yang utama yaitu Masyumi dan NU (mewakili partai agama), PNI (mewakili aliran kebangsaan/nasionalis) dan PKI (mewakili aliran Marxisme/komunisme). Munculnya empat partai besar tadi bukan berarti bahwa jumlah parpol dikurangi. Partai-partai lainnya tetap ada dan melakukan kegiatan seperti biasa yaitu berkiprah di dalam DPR dan dalam merancang Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Tetapi karena situasi politik bertambah buruk dengan terjadinya pemberontakan di beberapa daerah, terjadinya kemerosotan ekonomi dan tidak berhasilnya konstituante merumuskan UUD baru pengganti UUD S 1950 maka Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945 dengan sistem Presidensiil.

Terjadinya konflik politik dengan adanya PKI yang memanfaatkan perlindungan dari Presiden Soekarno dan kegagalan PKI melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965 membuat kekuasaan Orde Lama berakhir. Kekuasaan Presiden Soekarno digantikan Presiden Soeharto dan babak baru dimulai dengan lahirnya Orde Baru. Orde Baru mengadakan pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1971, pemilu tersebut diikuti oleh sepuluh partai politik yaitu Sekber Golongan Karya, PNI, NU, Partai Katholik, Partai Murba, PSII, IPKI, Partindo, Parmusi, dan Partai Islam dan pada pemilu tersebut Golongan Karya berhasil memperoleh suara terbanyak.

Pada tahun 1975 pemerintah memberlakukan UU No. 3/1975 yang memberlakukan 10 partai politik menjadi tiga partai politik yaitu Golkar, PPP dan PDI. Sejak 1987 ketiga partai tersebut menggunakan Pancasila sebagai

satu-satunya asas partai berdasar UU No. 3/1985 dan sistem ini bertahan hingga pemilu 1997. Pada tahun 1999 telah dirumuskan 3 paket Undang-Undang bidang politik yaitu UU No. 2/1999 tentang partai politik, UU No. 3/1999 tentang pemilu, dan UU No. 4/1999 tentang Susduk DPR/MPR/DPRD Kabupaten/Kota¹⁰. Setelah berakhirnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia kembali menganut sistem multi partai dengan berbagai asas dan aliran politik. Pada pemilu tahun 2004 digunakan UU No. 12/2003 tentang pemilihan umum dan mengenai partai politik yang dapat ikut menjadi peserta dalam pemilu tahun 2004 adalah partai politik yang sesuai dengan UU No. 31/2002 tentang partai politik.

c. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia¹¹. Adapun tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih akan membawakan aspirasi rakyat dalam membangun dan mempertahankan negara Indonesia.

Menurut M. Rusli Karim pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat untuk menjalankan suatu

¹⁰ Dokumen Panitia Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Jateng, tahun 1999, hlm. 25.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila)*, Jakarta : IND. CO, 1986, hlm. 1.

pemerintahan¹². Jadi pemilihan umum merupakan wujud aktualisasi keberadaan partai-partai politik untuk menjawab tantangan dan mengantarkan konstituantenya secara komprehensif dan integral.

Pemilihan umum pada dasarnya memiliki tiga tujuan yaitu¹³ :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif atau parlemen. Wakil rakyat tidak boleh sembarang orang sehingga diadakan pemilu sebagai penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.
2. Pemilihan umum merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilihan Umum 1999 dianggap oleh banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis di Indonesia sejak Orde Baru. Pemilu tahun

¹² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991, hlm. 2.

¹³ Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang : LP2L, 2003, hlm. 19-20.

1999 yang dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai ini telah disaksikan oleh pengawas baik dari dalam maupun luar negeri¹⁴.

Pemilu 2004 juga mempunyai arti yang penting dan strategis bagi bangsa Indonesia sebab akan memilih para anggota DPR, DPD dan DPRD juga ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Sistem yang digunakan untuk memilih calon anggota DPD dipilih dengan sistem distrik berwakil banyak karena Indonesia saat ini memiliki 31 Provinsi, sehingga jumlah kursi DPD yang diperebutkan ada 124 buah dan masing-masing provinsi diwakili 4 kursi. Sedang DPR/DPRD dipilih dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem ini adalah Hibrida antara sistem proporsional dan distrik. Nuansa distrik ditunjukkan dengan jumlah suara yang diperoleh Kandidat DPR/DPRD yang dipilih dengan cara memberikan tanda sebanyak 2 kali untuk partai dan gambar calon, sedangkan jika hanya memilih tanda partai berarti pemilihan calon ditentukan partai.

Adapun fungsi sistem pemilihan umum adalah :

1. Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi-kursi di badan legislatif.
2. Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggungjawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.
3. Sistem pemilu memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30-31

Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif terhadap kelompok pesaing atau sebaliknya dapat menghukum kandidat yang menghasilkan dukungan kepada pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka.

d. Partai GOLKAR

Partai Golongan Karya, pada mulanya masih bernama Sekber GOLKAR (Sekretariat Bersama Golongan Karya) yang merupakan federasi berbagai golongan kekarwaan yang dibentuk dalam menghadapi eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI)¹⁵. Sekber GOLKAR dibentuk atas dorongan TNI pada tanggal 20 Oktober 1964 yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1971 Sekber GOLKAR mengikuti pemilu dan ternyata rakyat memberikan kepercayaan kepada Sekber GOLKAR dan meraih suara terbesar.

Setelah meraih kemenangan pada pemilu 1971, maka sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik di Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. Selama perjalanannya GOLKAR telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru.

Sejak berakhirnya Orde Baru dan sejak pelaksanaan Munaslub GOLKAR pada bulan Juli 1998, GOLKAR semakin menegaskan untuk memperbaharui dirinya dengan semangat dan tuntutan reformasi. Visi dan

¹⁵ Afan Gafar, *op. cit*, hlm. 55.

Misi Partai GOLKAR baru berbeda dengan GOLKAR lama. Apabila dulu GOLKAR tidak bisa dipisahkan dari pemerintah dengan jalur ABRI, Birokrasi, namun sekarang Partai GOLKAR merupakan partai yang terpisah dari pemerintahan dan tidak ada lagi unsur PNS dan ABRI di dalamnya.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kearsipan. Dalam mencari sumber-sumber data untuk bahan penulisan, penulis menggunakan data historis yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan dan sumber lain yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di kantor DPD Kabupaten Klaten serta wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengambil teori dan konsep sebagai pendukung penelitian serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai topik yang dipilih.

Penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitik. Data-data ini diambil berdasarkan permasalahan yang digunakan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten dengan kurun waktu tahun 1999 dan 2004. Bila dilihat dari periode waktunya penulisan ini merupakan sejarah kontemporer dan dalam batasan ruang lingkup sejarah lokal.

1. Metode Penelitian

sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau¹⁶.

Adapun teknik pengumpulan sumber yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Sumber penulisan ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian saksi dengan mata kepala sendiri sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi yang melihat peristiwa itu secara langsung. Dalam penelitian ini data-data primernya adalah menggunakan dokumen-dokumen pemilihan umum 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten. Sedangkan data sekundernya adalah sumber kepustakaan yang ada sebagai pendukung kelancaran penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh atau orang yang memahami atau terlibat langsung dalam aktivitas politik Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

c. Kritik Sumber

Setelah memperoleh data yang dikumpulkan dari DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber dilakukan dengan cara membandingkan data-

¹⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto), Jakarta : UI_Press, 1986, hlm. 32.

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua, para pengurus Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten, para kader Partai GOLKAR dan data dokumen tentang Partai GOLKAR. Tujuan kritik sumber adalah mengetahui kebenaran dan keaslian sumber.

Untuk mengetahui informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan buku dilakukan metode perbandingan. Metode ini digunakan untuk membandingkan suatu informasi dengan informasi yang lainnya. Data tentang Partai GOLKAR pada pemilu 1999 dan 2004 kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh tersebut diuji kebenarannya. Kesamaan informasi dari berbagai sumber dipandang cukup layak untuk dinyatakan bahwa informasi itu benar.

d. Interpretasi

Setelah kebenaran dan keaslian sumber telah terjamin maka dilakukan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi ini dilakukan dengan jalan mengolah data yang diperoleh dengan cermat. Fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan perlu dihubungkan satu sama lain sebagai suatu rangkaian peristiwa yang masuk akal. Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sebuah sumber yang mengandung beberapa kemungkinan. Sintesis adalah penghayatan dari beberapa data¹⁷. Dengan adanya interpretasi maka dapat diperoleh fakta

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1995, hlm. 100-101.

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya sehingga akan menghasilkan susunan tulisan.

e. Penulisan

Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber sejarah yang terikat di dalamnya yang memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis dan sistematis suatu peristiwa sangat penting. Kronologis dan sistematis ini sangat mudah memberikan suatu pengertian dasar kapan suatu peristiwa itu terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat status sosial para pendukung Partai GOLKAR dilihat dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan peran masing-masing lapisan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pendekatan politik di gunakan untuk menjelaskan tentang berbagai persiapan yang dilakukan oleh Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam menghadapi pemilihan umum 1999 dan 2004 serta melihat lebih dekat tentang konsep kepemimpinan yang menyangkut distribusi kekuasaan, kebijaksanaan politik dan program-program politik yang telah direncanakan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari analisis data kemudian akan disusun dalam lima Bab, yakni :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah dengan rumusan masalah. Dalam pendahuluan juga diuraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori, metode penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten, yang berisi tentang terbentuknya Partai GOLKAR di tingkat Pusat dan proses terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

Bab III, membahas tentang perbandingan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasar UU Pemilu No. 3/1999 dan UU Pemilu No.12/2003 di Kabupaten Klaten.

Bab IV, membahas Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilihan umum 1999 dan 2004, yang berisi tentang persiapan yang dilakukan Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004, pelaksanaan kampanye dan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten. Di samping itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004.

Bab V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA PARTAI GOLKAR

A. Sejarah Terbentuknya Partai GOLKAR di Pusat.

I. Sejarah berdirinya Partai GOLKAR

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap Golongan Karya bibitnya telah tumbuh ketika membahas UUD 1945. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk mendirikan partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam¹⁸. Menjelang pemilihan umum 1955 terdaftar sekitar 52 kontestan partai politik dan perorangan. Namun yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 27 partai dan satu calon perorangan.

Kehidupan politik dalam sistem multi partai tersebut berlangsung sampai tahun 1957 dalam zaman yang dikenal dengan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Sistem multi partai yang dianut lebih menekankan pada kebebasan dan hampir mengabaikan segi pencapaian konsensus. Pada zaman inilah kendali percaturan politik berada di tangan partai-partai politik. Walaupun pemilu 1955 telah dilangsungkan namun tidak

¹⁸ Ridwan Saidi. *op. cit.* hlm. 1.

ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintah. Keadaan yang demikian mendorong setiap kabinet membentuk kabinet koalisi secara silih berganti. Suasana antara tahun 1950-1957 tidak kurang enam kabinet silih berganti dan setiap kabinet baru melahirkan program baru. Program kabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa. Akibatnya banyak program yang sedang dalam pelaksanaan menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit.

Sejarah telah mencatat bahwa umur kabinet pada zaman demokrasi parlementer tersebut rata-rata kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti bahwa tidak satupun kabinet dapat melaksanakan pembangunan karena setiap kabinet tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja. Sementara itu pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat makin meluas seperti pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan serta pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi.

Ketidakstabilan politik dan keamanan serta tidak terjaminnya keselamatan rakyat mendorong TNI mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Dalam usaha pemulihan keamanan TNI menyadari sepenuhnya bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan itu berlatar belakang sosial politik. Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah penggalangan golongan-golongan

fungsional dengan maksud agar golongan tersebut dapat diajak turut dalam usaha pemulihan keamanan.

Ajakan TNI kepada golongan-golongan fungsional untuk bekerjasama mendapat sambutan positif dari golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada suatu partai politik. Mereka merasa bahwa badan kerjasama yang dibentuk TNI itu adalah wadah perjuangan yang tepat untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Puncak pertentangan partai-partai politik dalam masa demokrasi parlementer adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan Dasar Negara pada tahun 1959. Pertentangan tersebut berpusat pada adanya partai-partai politik yang dengan gigih mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, tetapi ada pula partai-partai politik yang menghendaki dan memperjuangkan syariat Islam sebagai Dasar Negara. Karena tidak adanya kesepakatan maka diadakanlah pemungutan suara sampai tiga kali, tetapi masing-masing kelompok partai politik yang berbeda pendapat itu tidak mampu mengumpulkan 2/3 suara yang diperlukan.

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang dalam pembukaannya memuat Pancasila yang resmi sebagai Dasar Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka eksistensi golongan fungsional dalam lembaga perwakilan rakyat menjadi semakin jelas. Hal itu diwujudkan dengan dibentuknya DPR-GR oleh Presiden Soekarno atas desakan dari Angkatan

Darat. Komposisi dari anggota DPR-GR menunjukkan bahwa setengahnya berasal dari golongan fungsional. Usaha untuk membentuk golongan fungsional dalam lembaga perwakilan rakyat kemudian dicarikan dasar hukumnya yang mengacu pada UUD 1945 yaitu pasal 2 ayat I di mana yang menjadi anggota MPR adalah anggota DPR, Utusan Daerah dan Golongan¹⁹.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka mulailah dirintis penyederhanaan partai politik. Pada permulaan tahun 1961 hanya diakui 10 partai politik, tetapi walaupun jumlah partai politik telah berkurang ternyata tidak mengurangi pertentangan ideologi di dalam masyarakat tetapi pertentangan itu semakin meruncing. Hal ini disebabkan adanya format politik NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) yang digagas oleh Soekarno. PKI yang menjadi tulang punggung struktur politik NASAKOM itu menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan termasuk golongan fungsional "dinasakomkan". PKI sebagai tulang punggung utama politik NASAKOM menjadi semakin dominan dalam percaturan politik nasional. Untuk menghadapi ancaman PKI maka didirikanlah SOKSI, KOSGORO, dan MKGR.

Sebagai perlawanan terhadap tekanan-tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya di dalam masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus menerus dari golongan fungsional, berdasarkan Peraturan

¹⁹ Afan Gafar. *op. cit.* hlm. 34-35.



Presiden Nomor 12 tahun 1959 diangkatlah 200 orang wakil-wakil golongan karya di MPRS. Kemudian dengan keputusan Presiden No.193 tahun 1964 diakuiilah wakil-wakil golongan karya di Front Nasional.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya disingkat SEKBER GOLKAR pada tanggal 20 Oktober 1964. Dengan demikian jelaslah bahwa TNI telah memelopori lahirnya SEKBER GOLKAR dan dalam perkembangnya TNI menjadi partner SEKBER GOLKAR²⁰.

Setelah meletus peristiwa G.30. S/PKI maka TNI, SEKBER GOLKAR, pemuda, dan rakyat yang Pancasilais bangkit dengan serentak menumpas gerakan pengkhianatan G. 30. S/PKI dan dalam waktu yang singkat gerakan tersebut dapat ditumpas. Pada awal pertumbuhannya, SEKBER GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional karena golongan-golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa SEKBER GOLKAR berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta tujuan dan haluannya adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sementara itu proses kristalisasi dalam tubuh SEKBER GOLKAR berjalan terus, dengan didirikannya PARMUSI pada tahun 1968, maka sejumlah organisasi melepaskan diri dari SEKBER GOLKAR . selain itu dibentuklah KINO-KINO (Kelompok Induk Organisasi) sebagai

²⁰ A.H. Nasution 1971, *Kekaryaan ABRI*, Djakarta : Seruling Massa, hlm. 94.

pengelompokan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam SEKBER GOLKAR. Proses kristalisasi ini berlanjut lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 1969 yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan PERMEN 12²¹. Dalam keadaan yang telah terkristalisasi demikian, SEKBER GOLKAR memasuki pemilu tahun 1971. Ternyata rakyat memberikan kepercayaan pada SEKBER GOLKAR, di mana SEKBER GOLKAR memperoleh 62,79 % suara pemilih. Setelah meraih kemenangan dalam pemilu 1971, maka sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

2. Posisi dan Peran GOLKAR di masa Orde Baru

Dalam memasuki Orde Baru maka untuk memantapkan dirinya diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional I (MUKERNAS I) SEKBER GOLKAR dari tanggal 9-11 Desember 1965, dengan tema “konsolidasi organisasi dan partisipasi terhadap timbulnya Orde Baru”. MUKERNAS berhasil menyusun program konsolidasi organisasi dan program perjuangan disegala bidang dalam rangka usaha menegakkan Orde Baru.

Dalam masa awal Orde Baru, SEKBER GOLKAR tumbuh dan berkembang dengan pembaruan kehidupan politik berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta

²¹ Afan Gafar. *op. cit.* hlm. 37.

melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang sebagai upaya pengisian cita-cita proklamasi.

Selama perjalanannya GOLKAR telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru. Hal ini tercermin dari setiap pelaksanaan MUNAS GOLKAR yang selalu menghasilkan keputusan yang memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Dengan kata lain, program organisasi selalu disinkronkan dengan program pemerintah dan mendapat dukungan serta legitimasi dari lembaga legislatif yang dikuasai oleh GOLKAR.

Kedudukan Ketua Dewan Pembina yang juga adalah Presiden (Mandataris MPR) sangat dominan mewarnai keputusan-keputusan GOLKAR, bahkan dapat membatalkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh musyawarah organisasi. Hal ini telah menyebabkan berkurangnya kemandirian GOLKAR. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh GOLKAR apabila merupakan kebijakan penting dan esensial harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Pembina sehingga kepengurusannya terkesan telah kehilangan kreatifitas, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi.

Ada empat hal utama yang menjadi ciri GOLKAR di masa Orde Baru. Pertama, dikenalnya istilah Sistem Tiga Jalur ("A" ABRI, "B" Birokrasi, "G" GOLKAR). Kedua, dominannya peranan lembaga Dewan Pembina. Ketiga, pengambilan keputusan selalu dari atas. Dan keempat, sangat menghindari pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi di semua

tingkatan atau dari ketua umum DPP sampai pada tingkat kepemimpinan terbawah.

Fenomena umum yang tergambar dari kehidupan kekuatan sosial politik (Orde Baru, Pargol, dan GOLKAR) terkesan terlalu kaku, struktural, institusional dan formalistik terhadap seluruh kekuatan sosial politik, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, diarahkan untuk memberikan dukungan berupa legitimasi yang kuat kepada pemerintah Orde Baru. Keadaan tersebut tercipta akibat berkembangnya sistem politik yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama yang dikenal dengan nama pembangunanisme. Pembangunanisme kemudian melahirkan budaya politik teknokratik (mengutamakan kemampuan teknis/keahlian). Dalam masa awal Orde Baru golongan fungsional berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama 30 tahun.

3. Perkembangan Partai GOLKAR di Era Reformasi

Sejak pelaksanaan MUNASLUB GOLKAR pada bulan Juli 1998 GOLKAR semakin menegaskan untuk memperbaharui dirinya sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi. Visi dan misi Partai GOLKAR Baru memang tampak berbeda dengan GOLKAR lama. Ada beberapa ciri yang tidak lagi melekat dari GOLKAR masa lampau, sekalipun Partai GOLKAR juga tetap mempertahankan citra sejarahnya sebagai kekuatan politik nasional yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai perbedaan yang signifikan dengan GOLKAR masa lampau adalah pembaharuan Partai GOLKAR.

Struktur kepemimpinan Partai GOLKAR era reformasi tidak lagi mempunyai institusi Dewan Pembina. Dahulu Dewan Pembina GOLKAR dipimpin oleh Presiden, sekarang ini Dewan Pembina GOLKAR tersebut dihapus. Partai GOLKAR menghapus institusi Dewan Pertimbangan di Propinsi, ketua Dewan Pertimbangan itu adalah Gubernur. Partai GOLKAR tidak lagi punya Dewan Penasehat di Kabupaten/kota yang semula dijabat oleh Bupati.

Di era reformasi, Partai GOLKAR mempunyai institusi penasehat. Namun posisi penasehat tidak secara struktural membawahi kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat masing-masing (pusat dan daerah). Para penasehat diangkat berdasarkan pertimbangan senioritas dalam kekaderan GOLKAR dan nasehat itu tidak mengikat Partai GOLKAR. Selama lebih dari 30 tahun pengambilan keputusan politik sangat didominasi oleh Dewan Pembina, Dewan pertimbangan, dan Dewan Penasehat, sehingga Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR hanya menjadi pelaksana saja. Setelah deklarasi GOLKAR Baru tidak ada lagi campur tangan struktur lain di atas Dewan Pimpinan. Partai GOLKAR benar-benar berada di tangan Dewan Pimpinan dari Partai GOLKAR sendiri yang secara mandiri menetapkan keputusan bagi kepentingan organisasi partai.

Adapun visi dan misi Partai GOLKAR yang baru adalah

1. Visi Perjuangan

Sejalan dengan cita-cita para Bapak pendiri negara (the founding fathers) bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada dasarnya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita di semua bidang agar dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan yang hakiki yang merupakan nafas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, maka harus diciptakan sistem sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar

mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum.

Di bidang ekonomi visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlalu menekankan pada pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerumus dalam krisis ekonomi yang sangat parah.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan di masa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Di bidang budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau ketrampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu, budaya kerja, budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius di kalangan masyarakat.

Partai GOLKAR menganggap kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antarindividu, antarkelompok, antara kota-desa, antara jawa-luar jawa, dan antar pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus diutamakan. Demikian juga pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati antar warga negara.

2. Misi Partai GOLKAR Baru

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni : menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pembangunan nasional disegala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah Partai politik modern yaitu :

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan politik. Dengan begitu para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

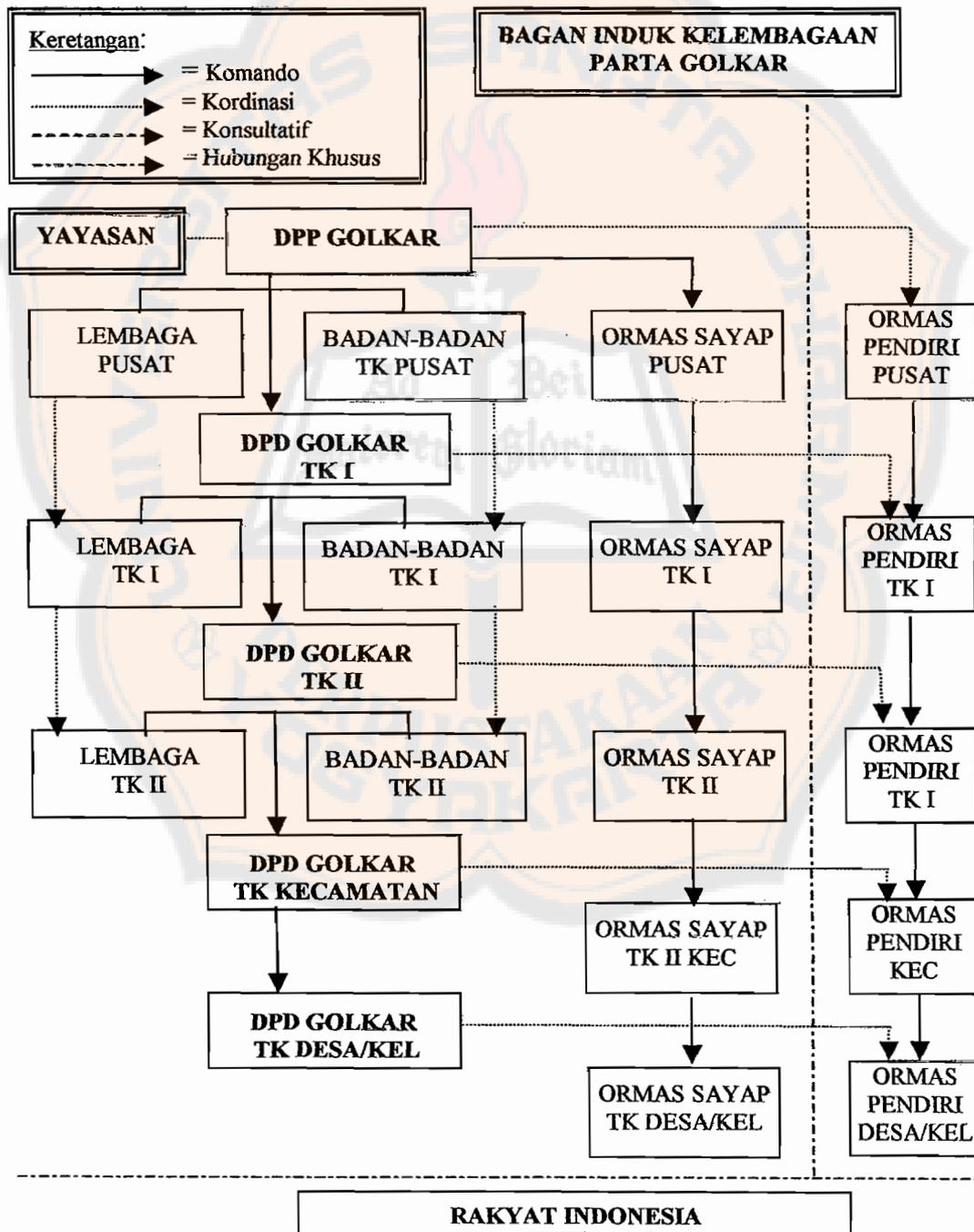
3. Format baru kelembagaan partai GOLKAR

Pembaharuan format kelembagaan Partai GOLKAR dilakukan dengan :

- a. Penataan kelembagaan Partai GOLKAR dilakukan dengan mempertegas fungsi-fungsi pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan pengawasan.
- b. Fungsi-fungsi pengkajian, penelitian, pengembangan dan advokasi perlu diwadahi secara otonom dan ditempatkan terpisah dari struktur Dewan Pimpinan. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan-badan otonom disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Pembentukan kelembagaan organisasi sebagai kepanjangan tangan bidang-bidang tertentu dalam struktur Dewan Pimpinan yang disebut Lembaga, untuk melaksanakan tugas-tugas yang penting dan secara strategis secara lebih efisien dan efektif.
- d. Penataan kembali hubungan Partai GOLKAR dengan Ormas Pendiri, Ormas yang didirikan serta Ormas-ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR. Masing-masing kelompok organisasi tersebut memiliki sejarah yang berbeda-beda, dan karenanya posisi dan hubungannya dengan Partai GOLKAR juga harus memperhatikan masalah tersebut.
- e. Pembentukan organisasi-organisasi sayap bertujuan untuk memperluas basis Partai GOLKAR di tengah-tengah masyarakat, yang dikembangkan berdasarkan kelompok-kelompok strategis, seperti pemuda/mahasiswa, wanita, pekerja, petani, nelayan, dll.
- f. Sebagai konsekuensi dari pembentukan badan-badan serta pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari struktur

tingkat pusat kepada struktur di tingkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian komposisi dan personalia Dewan Pimpinan, Dewan pimpinan Daerah Tingkat Propinsi maupun Dewan Pimpinan Tingkat kabupaten.

BAGAN INDUK KELEMBAGAAN PARTAI GOLKAR



B. Sejarah Terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten

1. Sejarah berdirinya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten

Terbentuknya GOLKAR di Kabupaten Klaten tidak dapat terlepas dari terbentuk dan berkembangnya GOLKAR di tingkat Pusat. Pembentukan DPP dan DPD GOLKAR pada dasarnya merupakan tuntutan mekanisme kehidupan partai yang harus berlangsung dan berjalan di tingkat daerah yang merupakan perwujudan dari tahap konsolidasi yang berhasil dicapai oleh pusat di tingkat daerah.

Pada tahun 1964 diadakanlah rapat bagi terbentuknya GOLKAR di Kabupaten Klaten. Musyawarah tersebut bertempat di PT Rumpun Ketandan Klaten²². Musyawarah tersebut dihadiri oleh para tokoh terkemuka antara lain, Mayor Soeparman, Suwarno BS, Fx. Soemantoyo, Soedarto, Dr. Tri Tresno Kemat, K. Subagyo, Letkol Ramlan Yitnowardoyo, Y. Sutopo, Sarwono, Mayor Hari, dll. Mereka berkumpul dan mengadakan musyawarah, kemudian mereka sepakat untuk membentuk suatu wadah kegiatan politik yaitu SEKBER GOLKAR. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada halangan yang berarti sebab para tokoh tersebut sama-sama mempunyai kesadaran yang tinggi agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan. Setelah terwujudnya kesepakatan dan menghasilkan SEKBER GOLKAR maka langkah selanjutnya membentuk kepengurusan SEKBER GOLKAR, sama seperti daerah-daerah yang lain dalam pembentukan kepengurusan timbul perselisihan-perselisihan tentang siapa yang akan didudukkan dalam kepengurusan SEKBER GOLKAR.

²² Wawancara dengan Bp. Arjo anggota DPD Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten tanggal 7 April 2004.

Akhirnya para tokoh yang mengadakan rapat tersebut sepakat membentuk kepengurusan dengan cara kesesuaian atau mereka yang dianggap sesuai dan mampu.

Pada awal berdirinya SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten tidak banyak menemui hambatan karena didukung oleh pemerintah. Adapun golongan yang mendukung SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten ada tiga jalur yang dikenal dengan jalur "A", jalur "B", dan jalur "G". Jalur "A" terdiri dari Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI), Lagiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Istri Purnawirawan ABRI (PERIB), Pemuda Panca MARGA (PPM), KORPRI UNIT HANKAM, dll. Jalur "B" terdiri dari KORPRI, HANSIP, PRAMUKA, PGRI, dan jalur "G" terdiri dari MKGR, KOSGORO, AMPI, HWK, PERWARI, IBI, MDI, LDII, dll. Pada awal berdirinya masih banyak anggota-anggota PKI yang masih ada dan tidak mendukung berdirinya GOLKAR di Kabupaten Klaten. Hambatan-hambatan itu ternyata tidak menyurutkan semangat golongan fungsional untuk tetap mempertahankan berdirinya SEKBER GOLKAR. Pada awal berdirinya SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten bertempat di PT Rumpun Ketandan Klaten sampai pada pemilu 1971.

Adapun susunan pengurus DPD SEKBER GOLKAR pada waktu mulai berdiri, yaitu pada tahun 1964 adalah :

1. Ketua : Mayor Soeparman
2. Sekretaris : Soewarno, BS
3. Wakil Sekretaris : Fx. Soemantoyo

4. Bendahara : Soedarto
5. Anggota :
 - a. Soekarno
 - b. Mayor Hari
 - c. Dr. Tri Tresno Kemat
 - d. Letkol Ramlan Yitnowardoyo
 - e. Sarwono
 - f. Juwadi
 - g. Arjo
 - h. Y. Sutopo
 - i. K. Subagyo

Setelah terbentuk susunan pengurus DPD SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten maka pada tahun 1964 nama-nama pengurus DPD SEKBER GOLKAR tersebut diajukan ke DPP SEKBER GOLKAR di Jakarta untuk dilakukan pengesahan terhadap susunan pengurus DPD SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten²³.

SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten memasuki pemilu yang pertama tahun 1971 di mana SEKBER GOLKAR memperoleh suara terbanyak sehingga menempati posisi pertama. Hal itu disebabkan karena masyarakat mulai sadar dan menginginkan adanya perubahan dalam kehidupannya. Dengan kemenangan yang diraih SEKBER GOLKAR tersebut rakyat berharap dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten

²³ Wawancara dengan Bp. Y. Sutopo Sekretaris DPD Partai GOLKAR, tanggal 12 April 2004.

Klaten. Keberhasilan SEKBER GOLKAR tersebut sesuai dengan ketentuan dalam MPRS tentang perlunya kembali penataan kehidupan politik di Indonesia maka pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR berubah nama menjadi GOLKAR. Perubahan dari pusat tersebut juga diikuti oleh GOLKAR di daerah termasuk di Kabupaten Klaten.

Kantor DPD GOLKAR di Kabupaten Klaten yang semula bertempat di PT Rumpun Ketandan, pada pemilu 1977 sampai pemilu 1983 kantor DPD GOLKAR pindah dan bertempat di Pencatatan Sipil Bareng Klaten. Baru setelah pemilu 1983 sampai sekarang kantor DPD GOLKAR berpusat di jalan Soeradji Tirtonegoro. Sejak pemilu 1977 sampai pada pemilu 1997 Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten selalu memperoleh suara terbanyak.

2. Perkembangan Partai GOLKAR tahun 1964-2004 di Kabupaten Klaten.

Sejak berdirinya yaitu tahun 1964-1997 SEKBER GOLKAR Kabupaten Klaten selalu mendapat suara terbanyak dalam pemilu. Hal ini terjadi karena SEKBER GOLKAR selalu mendapat dukungan dari golongan yang terkenal dengan jalur "A", jalur "B", dan jalur "G". Dalam setiap pemilu peranan jalur "A" dan "B" cukup dominan untuk membantu jalur "G" sehingga selalu menjadi pemenang dalam pemilu. Selain itu program pembangunan yang telah berlangsung sejak awal Orde Baru yang dimotori oleh GOLKAR telah mampu menciptakan tingkat kesejahteraan rakyat yang cukup membanggakan termasuk di Kabupaten Klaten. Hal itu sesuai dengan tujuan dari GOLKAR, bahwa dalam rangka menata peri kehidupan perekonomian di Kabupaten Klaten, GOLKAR kabupaten Klaten telah

merekomendasikan perlunya pengembangan ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya dengan sistem perekonomian inilah yang akan menjamin rakyat akan semakin sejahtera. Sejalan dengan itu telah hadir pula di masyarakat kita sejumlah fenomena baru, fenomena baru itu tidak saja memberi keuntungan politis bagi Golongan Karya tetapi juga sekaligus membawa tantangan baru bagi GOLKAR. Generasi muda yang lahir pada era 60-70 an adalah salah satu fenomena baru itu, mereka telah tumbuh sebagai masyarakat baru di negara kita.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan yang mereka nikmati menciptakan kultur masyarakat yang kritis, maju dan modern di mana keadaan ini sebetulnya juga akibat dari keberhasilan pembangunan. Jadi selama kurang lebih 30 tahun kehidupan masyarakat di Kabupaten Klaten sangat baik. Hal itu juga diakibatkan karena GOLKAR di Kabupaten Klaten selalu memperhatikan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial antara lain memberikan bantuan pada masyarakat yang kurang mampu, membantu masyarakat yang terkena bencana dan juga memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah di Klaten.

Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa pada tahun 1997-1998 merupakan suatu perubahan politik yang harus terjadi. Perubahan yang begitu cepat tersebut ikut mendorong GOLKAR melakukan langkah-langkah reformasi begitu juga GOLKAR di Kabupaten Klaten karena perkembangannya mengikuti perkembangan di pusat. Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Partai GOLKAR tidak hanya menyangkut

paradigma yang berisi visi, misi, strategi dan program perjuangan namun mencakup pula perubahan kelembagaan yang bersifat menyeluruh. Sejak lahirnya era reformasi partai GOLKAR dituntut melakukan penyesuaian dan pembaharuan terutama dengan lahirnya Undang-Undang baru dibidang politik. Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang partai politik menegaskan bahwa pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota dan pengurus dari partai politik serta birokrasi bersifat netral sehingga mengakibatkan pendukung GOLKAR berkurang.

Gerakan reformasi tersebut juga berdampak buruk pada GOLKAR di Kabupaten Klaten, karena banyak kader GOLKAR yang keluar dan meninggalkan GOLKAR dan ikut partai lain. Sesuai dengan semangat reformasi itulah maka pada tahun 1999 GOLKAR ditetapkan sebagai Partai Politik dalam MUNASLUB yang sejalan dengan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

Pada pemilu tahun 1999 Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mengalami penurunan jumlah suara. Penurunan ini pada awalnya memang cukup menimbulkan kekecewaan yang dirasakan oleh seluruh Kader Keluarga Besar Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten khususnya oleh pengurus, namun penurunan jumlah suara tersebut bukan hanya terjadi di Klaten tetapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Partai GOLKAR adalah penyebab krisis yang terjadi di Indonesia yang juga berimbas di Klaten. Selain faktor tersebut ada juga faktor lain yang menyebabkan partai GOLKAR mengalami

penurunan suara yaitu adanya kekecewaan masyarakat akibat sikap dan perilaku penguasa Orde Baru yang arogan dan KKN yang diidentifikasi dengan GOLKAR. Faktor lainnya adalah adanya hujatan-hujatan dari partai politik lain dengan disertai gerakan-gerakan yang berindikasi kekerasan dan intimidasi yang berakibat terciptanya situasi kecemasan rakyat sehingga takut memilih GOLKAR. Sebagai contohnya pada tahun 1999 kantor DPD Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dibakar, kejadian itu membuat masyarakat yang masih mendukung Partai GOLKAR menjadi takut. Kantor DPD yang dibakar tersebut kemudian dibangun kembali dan diresmikan oleh Ketua Umum Partai GOLKAR Akbar Tanjung pada tanggal 20 Oktober 1999 ketika Partai GOLKAR sedang memperingati hari ulang tahunnya²⁴.

Pada pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan jumlah suara. Kenaikan jumlah suara itu tidak terlepas dari usaha-usaha para pengurus Partai GOLKAR dalam menggalang massa. Hal itu menandakan bahwa Partai GOLKAR tidak patah semangat dalam memajukan Partai GOLKAR. Partai GOLKAR tetap optimis bahwa perolehan suara partai-partai peserta pemilu masih akan selalu berubah. Sebab itu, tidak ada kamus putus asa untuk kembali menaikkan jumlah suara dalam setiap pemilu.

²⁴ Wawancara dengan Bp. Sutrasno. *Caleg dari Partai GOLKAR tanggal 20 April 2004.*

C. Keanggotaan Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten Tahun 1999 dan 2004.

Keanggotaan Partai GOLKAR yang dibentuk tahun 1997 sejalan dengan pelaksanaan MUNASLUB tahun 1998 maka keanggotaan Partai GOLKAR berlaku sampai pemilu tahun 2004. Adapun susunan anggota DPD Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten periode 1997-2004 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : K. Soebagyo
2. Wakil Ketua : a. Drs. Djuwardi, BBA
b. Drs. Sri Widodo H
c. Drs. Soeparno
d. R. Sutomo Diswarin
e. H. Moch Soleh
3. Sekretaris : Y. Sutopo, Bsc
4. Wk. Sekretaris : a. FX. Setyawan DS
b. Drs. Anang Widayaka
c. Dedhari Sutrasno
d. Sadini
e. Ir. Kusdibyو
5. Bendahara : H.M Soewanto, BcHK
6. Wk. Bendahara : a. Tarmudji, ST. MT
b. Sudiyono Wibowo
7. Anggota :
a. Muhyidin (bagian PP dan OKK)

- b. H. Herry Suharjo (bagian PP dan OKK)
- c. Ny. Sri Wening, Spd (bagian Humas dan medmas)
- d. Ny. Dra. Setyani A (bagian Hmas dan medmas)
- e. Tarmanto (bagian wanita, Kesra, Abdimas)
- f. Ny. Ngadiningsih M (bagian wanita, Kesra, Abdimas)
- g. Ny. Sumarsih Sugito (bagian wanita, Kesra, abdimas)
- h. Yoga Hardaya, SH (bagian pemuda, olah raga, seni dan budaya)
- i. Joko Santoso, SH (bagian pendidikan kursus)
- j. Ny. Niken Rahayu (bagian pendidikan kursus)
- k. Hariyadi Suwarno (bagian tenaga kerja)
- l. Sumpono (bagian tenaga kerja)
- m. Gunarto, BA (bagian kerohanian)
- n. Wiwoho Harto, Bsc (bagian kerohanian)
- o. Suprpto, SH (bagian lembaga hukum)
- p. Hengky Asnari S, SH (bagian lembaga hukum)
- g. Drs. Y. Sugiyanto (bagian Litbang)
- r. Ir. Gigih Dasa N (bagian Litbang)

Keanggotaan pengurus tersebut dipilih berdasarkan pengabdian para anggota selama menjadi anggota Partai GOLKAR dan berdasarkan keputusan seluruh anggota partai.

BAB III

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN UU PEMILU NO. 3 TAHUN 1999 DAN
UU PEMILU NO. 12 TAHUN 2003**

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan sistem kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

Dasar pemikiran tersebut di atas merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945, sesuai tuntutan reformasi. Guna mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945 serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan, untuk

membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dipilih melalui pemilu. Melalui pemilu tersebut diharapkan akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam negara Republik Indonesia yang majemuk, berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan negara. Karena itu peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu

untuk mengakomodasikan aspirasi daerah dipilihlah anggota DPD untuk memperkuat negara kesatuan republik Indonesia yang pesertanya perseorangan.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu diperlukan Undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-Undang No. 3/1999 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12/2003.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun pengertian asas pemilu tersebut adalah :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan umum yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

c. Bebas

setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap

warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. **Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suara diberikan.

e. **Jujur**

dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, pengurus pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. **Adil**

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun²⁵.

A. Persamaan UU Pemilu No. 3 tahun 1999 dan UU Pemilu No. 12 tahun 2004.

1. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota sama-sama dilakukan dengan sistem proporsional seperti yang termuat dalam UU No. 3 tahun 1999 pasal I ayat 7 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem

²⁵ UU RI No. 12/ 2003 *Tentang Pemilu tahun 2004*, 2003, Bandung : Citra Umbara, hlm. 98.

proporsional²⁶. Sedangkan pada UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional²⁷.

2. Persamaan yang lain adalah mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan daerah pemilihan sesuai dengan tingkatannya sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 3 tahun 1999 dan UU pemilu No. 12 tahun 2003 yang berbunyi daerah untuk memilih anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi. Untuk pemilihan anggota DPRD I daerah pemilihannya adalah Kabupaten/Kota sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD II daerah pemilihannya adalah Kecamatan. Jumlah kursi untuk anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan cara penghitungan jumlah kursi anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
3. Dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 sama-sama ada pengawas yang mengawasi jalannya pemilu. Adapun tugas dari pengawas pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Hal itu seperti yang termuat dalam UU pemilu No. 3 tahun

²⁶ UU No.3 /1999, *op.cit.* hlm. 27.

²⁷ UU No.12/2003, *op.cit.* hlm.6.



1999 pasal 24 ayat I yang berbunyi “dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dibentuk panitia pengawas²⁸. Dalam UU No. 12 tahun 2003 pasal 120 ayat I juga disebutkan bahwa untuk melakukan pengawasan pemilu, dibentuk panitia pengawas pemilu yaitu panitia pengawas pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu Kabupaten dan panitia pengawas pemilu Kecamatan²⁹.

4. Hak memilih dalam pemilu antara UU No. 3 tahun 1999 pasal 13 dan UU No. 12 tahun 2003 pasal 28 juga mempunyai persamaan bahwa warga negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk pemilihan umum sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Jadi semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat mempunyai hak yang sama dalam pemilu.
5. Persamaan yang lain adalah mengenai penyelenggaraan kampanye. Dalam UU No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003 sama-sama menyelenggarakan kampanye sebelum pemilu berlangsung seperti yang termuat dalam UU No. 3 tahun 1999 pasal 46 sedangkan dalam UU No. 12 tahun 2003 terdapat dalam pasal 71. Dalam kampanye tersebut rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kampanye tersebut dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk menyampaikan program-program pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye peserta kampanye dilarang

²⁸ UU No. 3/1999, *op.cit*, hlm.37.

²⁹ UU No. 12/2003, *op.cit*, hlm.77.

menghina partai politik lain, mengadu domba kelompok masyarakat dan juga melakukan kekerasan.

6. Dana kampanye pemilihan umum pada tahun 1999 dan 2004 untuk masing-masing partai politik sama-sama diperoleh dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Selain itu dana kampanye juga diperoleh dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum swasta atau perseorangan. Dalam kampanye peserta pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dan pemerintah, BUMN, BUMD. Batas dana kampanye yang diterima oleh partai politik peserta pemilihan umum ditetapkan oleh KPU. Hal itu sesuai dengan UU No. 3 tahun 1999 pasal 48 dan UU No. 12 tahun 2003 pasal 78 tentang pemilihan umum.

B. Perbedaan UU No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

1. Sistem pemilihan

Sistem pemilihan umum tahun 1999 dan 2004 berbeda sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3/1999 tentang pemilu pasal I ayat 7 yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar”³⁰. Sedang pada UU No. 12/2003 tentang pemilu seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

³⁰ UU RI No. 3/1999 *Tentang Pemilihan Umum*, 1999, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27.

dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dan ayat 2 berbunyi pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak³¹.

Lebih jelas perbedaan pemilu 1999 dan 2004 adalah sistem pemilihan yang digunakan. Untuk memilih anggota DPD digunakan sistem distrik, Indonesia saat ini memiliki 31 Provinsi sehingga jumlah kursi DPD yang diperebutkan 124 buah karena masing-masing Provinsi diwakili 4 kursi³². Sedangkan DPR/DPRD dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sistem ini adalah hibrida dari sistem proporsional dan distrik. Sistem distrik ditunjukkan dengan jumlah suara yang diperoleh kandidat DPR/DPRD yang dipilih dengan cara memberikan tanda sebanyak dua kali untuk partai dan gambar calon, sedangkan jika hanya menandai sekali dengan memilih tanda partai berarti pemilihan calon ditentukan partai (dengan sistem proporsional). Sistem proporsional juga ditentukan dari penentuan kursi jika tidak ada calon DPR/DPRD yang memenuhi bilangan pembagi. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah bahwa keterwakilan rakyat sangat kurang.

Sistem distrik membagi wilayah suatu negara ke dalam beberapa distrik pemilihan. Sistem distrik memiliki keunggulan yaitu dikenalnya sang wakil rakyat oleh pemilihnya, lain daripada itu sistem ini dianggap lebih mampu menjamin stabilitas politik. Tetapi salah satu kelemahan sistem ini adalah hilangnya begitu saja suara dari partai politik yang kalah di satu distrik

³¹ UU No. 12/2003, *op. cit.* 6

³² Joko Prihatmoko, *op. cit.* hlm. 30.

pemilihan. Suara yang kalah itu tidak bisa digabung dengan suara didistrik yang lain. Itulah sebabnya kemungkinan hidup bagi partai-partai kecil menjadi sulit sehingga sistem ini dianggap kurang representatif karena suara minoritas dikesampingkan. Di dalam sistem distrik ini para pemilih mencoblos gambar wakil rakyat yang dipilihnya.

Sistem proporsional, sebaliknya membagi wilayah negara ke dalam beberapa daerah pemilihan yang besar. Salah satu kelemahan sistem ini adalah kurang dikenalnya wakil rakyat oleh para pemilihnya sehingga tidak terjadi kedekatan hubungan pribadi dan politik, tetapi keunggulannya adalah sifat keterwakilannya tinggi. Ini disebabkan oleh aturan bahwa suara dari partai yang kalah disuatu daerah pemilihan bisa dan boleh digabung dengan suara dari partai yang sama di daerah pemilihan lain. Sebab itu dikatakan bahwa sistem proporsional ini lebih representatif karena suara minoritas tidak dihilangkan begitu saja.

Pada prinsipnya partai GOLKAR siap menggunakan sistem pemilu distrik dan proporsional. Pada hakekatnya Partai GOLKAR siap mengikuti perubahan sistem pemilu seperti yang digagas LSM dan komponen masyarakat. Visi Partai GOLKAR sama dengan Visi aspirasi komponen masyarakat yang reformis terutama mengenai perlunya perubahan sistem pemilu di Indonesia³³.

Bagi Partai GOLKAR sendiri sistem pemilu pada tahun 1999 dan 2004 lebih menguntungkan yang tahun 2004 karena dengan sistem tersebut Partai

³³ Dokumen *Partai GOLKAR*, tahun 2004, Kabupaten Klaten, hlm.48.

GOLKAR dapat membangun citra partai lewat calon anggota legislatif³⁴. Hal itu dapat dilihat dari calon yang dipilih oleh rakyat, karena rakyat dapat memilih langsung wakilnya dan rakyat benar-benar tahu figur dari calon tersebut. Pada dasarnya sistem pemilihan umum tahun 1999 dan 2004 tidak berbeda secara signifikan keduanya merupakan hibrida antara proporsional dan distrik atau semi proporsional. Jika sistem pemilu tahun 1999 merupakan sistem campuran berdasarkan sistem proporsional, namun mengandung benih sistem distrik sedangkan dalam pemilu tahun 2004 benih distrik itu sudah jelas walaupun sangat terbatas yang ditunjukkan dengan sistem penghitungan dan mekanisme penetapan calon terpilih.

Dalam pemilu 1999, sistem penghitungan yang digunakan bersifat linear artinya jumlah kursi yang dimenangkan suatu partai ditentukan secara proporsional, namun pilihan anggota parlemen ditentukan oleh kinerja mereka dalam wilayah pemilihan di propinsi masing-masing. Dalam sistem itu nomor urut calon ditentukan oleh pimpinan partai karena pemilih hanya menandai gambar partai. Dengan identifikasi pilihan yang tidak jelas itu, calon tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak terpilih walaupun dekat dan dikenal pemilihnya.

Adapun dalam pemilu 2004, dilakukan proses kombinasi secara paralel minimalis artinya, sebagian calon anggota legislatif dipilih secara distrik dan sebagian lainnya secara proporsional. Implikasi teknisnya pemilih mencoblos tanda gambar partai dan calon di bawah tanda partai atau hanya tanda gambar partai saja. Teknik pertama berarti pemilih memilih sendiri calon (sistem

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Dedhari Sutrasno Anggota DPRD dari Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 2004, tanggal 22 September 2004.

distrik) dan tehnik kedua menyerahkan pilihan calon pada partai (sistem proporsional).

Walaupun akarnya sama sistem pemilu tahun 1999 dan 2004 memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Kelebihan sistem pemilu tahun 1999 adalah mudah dipahami, kertas suara tidak terlalu besar. Kelemahan yang mencolok dari sistem pemilu tahun 1999 terpilih atau tidaknya seorang calon tergantung pada pimpinan partai, yang terutama terlihat dalam urutan Daftar Calon Tetap yang diusulkan masing-masing partai.

Sedangkan kelebihan sistem pemilu 2004 mencakup sistem pemilihan longgar karena bisa menggunakan tehnik sekali tanda atau dua kali tanda. Pemilih cenderung memilih calon-calon yang dikenal wajahnya sehingga secara struktural lebih kuat. Dengan adanya sistem pemilu tahun 2004 maka kelemahan sistem pemilu tahun 1999 dapat dikurangi dan diharapkan pemilih dapat mengenal calon anggota DPR/DPRD yang dipilihnya.

Sistem pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalam pemilu. Karakter yang dimaksud di sini adalah ciri-ciri yang menonjol dari kompetisi dalam pemilu. Sebagai salah satu mekanisme kelembagaan demokrasi, sistem pemilu merupakan wahana yang dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai-partai besar. Artinya sistem pemilihan bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu, khususnya memenangkan kekuatan politik tertentu dan sebaliknya menciptakan hambatan guna melemahkan kekuatan politik.

2. Lembaga yang dipilih

Dalam UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, DPRD II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD I, DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)”³⁵. Sedangkan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu pasal 3 disebutkan bahwa “pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”³⁶.

Dalam Amandemen keempat pasal 2 ayat 1 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Karena itulah dalam pemilu 2004, pemilih tidak hanya memilih anggota DPR namun juga anggota DPD. Inilah komposisi yang diharapkan benar-benar mewakili rakyat Indonesia. DPR adalah wujud keterwakilan gagasan (*representation of ideas*), sedangkan DPD adalah keterwakilan dalam kehadiran (*representation in presence*). Kursi DPR yang diperebutkan mencapai 550 kursi sedangkan DPD paling banyak sepertiga jumlah DPR. Dengan pemilihan anggota DPR dan DPD diharapkan parlemen yang terbentuk pasca pemilu 2004 adalah cermin bangsa yang dapat melihat,

³⁵ UU No. 3/1999, *op. cit*, hlm. 26

³⁶ UU No. 12/2003, *op. cit*, hlm.-5

merasa, berpikir dan bertindak dengan cara yang dapat mencerminkan rakyat secara keseluruhan.

DPD dipilih dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak, tiap-tiap Provinsi diwakili 4 kursi, sedangkan DPR dipilih dengan sistem campuran yang amat kental nuansa proporsionalnya. Karena itu, tingkat atau kualitas kompetisi calon anggota DPD sangat tinggi ketimbang DPR. Pertama, jumlah anggota DPD maksimal hanya sepertiga anggota DPR. Kedua, tugas dan tanggung jawab DPD tidak sebanding dengan DPR. DPD hanya berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan otonomi Daerah sehingga lebih mirip perluasan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Ketiga, DPD bisa diberhentikan oleh DPR dan presiden sehingga DPD hanya merupakan *week chamber* di bawah DPR dan Presiden³⁷.

3. Pendaftaran pemilih

Perbedaan pemilu tahun 1999 dan 2004 juga terlihat pada pendaftaran pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “pendaftaran pemilih di tempat yang ditentukan dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah³⁸. Sedangkan pada UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu pasal 53 ayat I berbunyi “pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih³⁹”.

³⁷ Joko Prihatmoko, *op. cit*, hlm. 29.

³⁸ UU No. 3/1999, *op. cit*, hlm. 40.

³⁹ UU No. 12/2003, *op. cit*, hlm. 33.

Penjelasan lebih lanjutnya adalah bahwa, dalam sistem pendaftaran pemilu 1999 pemilih harus mengambil inisiatif untuk mendaftarkan dirinya sendiri. Hal itu baik karena berarti mendorong pemilih dari pendaftaran pasif menjadi aktif. Tetapi karena kelemahan prinsipil di atas maka untuk pemilu 2004 dilakukan dengan sistem pasif dan aktif. Di satu sisi petugas pencacah jiwa mendatangi rumah-rumah warga untuk dicacah sebagai pemilih, tidak membedakan di daerah Kota dan lainnya maupun daerah-daerah yang terisolasi. Di sisi lain pemilih juga bisa mendatangi petugas untuk dicacah sebagai pemilih. Dengan demikian sistem pendaftaran pemilih sangat memperhatikan tanggung jawab dan keberlanjutan pemilu.

4. Penyelenggaraan pemilu

Perbedaan pemilu yang lain adalah mengenai penyelenggaraan pemilu. Dalam pemilu 1999 Partai dan Pemerintah terlibat, bahkan dominan dalam KPU (Komisi Pemilihan Umum), seperti yang dimaksud dalam UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilu yaitu pada pasal 8 ayat 1 dan 2. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “penanggung jawab pemilihan umum adalah Presiden dan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh KPU yang bebas dan mandiri yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilihan umum dan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden”⁴⁰. Formasi KPU pada tahun 1999 itu sungguh merupakan otkritik bagi partai karena keadilan dan transparansi penyelenggaraan pemilu tidak

⁴⁰ UU No. 3/1999, *op. cit.*, hlm. 30.

akan tercapai jika orang-orang partai duduk di KPU karena mereka terlibat dalam konflik kepentingan.

Pada pemilu 2004 KPU diisi oleh individu-individu non partisan dan independen, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu pada pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan KPU lah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu⁴¹.

Dalam pembahasan RUU pemilu tahun 2003 memang terjadi pertentangan pendapat mengenai pertanggungjawaban hasil kerja KPU, Presiden atau KPU. Tetapi keputusan terakhir KPU sendiri yang bertanggung jawab sehingga lebih rasional. Personalia KPU diseleksi dan dipilih secara ketat dan berjenjang. KPU Pusat diseleksi dan dipilih oleh DPR, KPU Provinsi dipilih oleh KPU Pusat, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Provinsi. Tetapi sayang dalam memproses pembentukan KPU daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) pengaruh partai-partai politik melalui DPRD dan Gubernur atau Bupati sangat menonjol sehingga diduga hasilnya kurang seperti yang diharapkan. Beberapa daerah justru politisi dan orang partai yang ditunjuk sebagai anggota tim seleksi dan ada yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memahami persoalan-persoalan pemilu 2004 karena disiplinnya bukan politik⁴². KPU juga menjadi lembaga penerima protes dan pengaduan masyarakat, menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi kepada partai peserta pemilu. Kehadiran KPU sekarang ini diharapkan dapat mempercepat

⁴¹ UU No. 12/2003, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴² Joko Prihatmoko, *op. cit.*, hlm. 32.

proses institusionalisasi dan badan-badan non negara dan secara otomatis mengurangi intensitas konflik politik.

5. Penetapan hasil pemilihan umum

Perbedaan yang lain adalah mengenai penetapan hasil pemilihan umum. Dalam UU No. 3 tahun 1999 pasal 67 ayat 1,2,3 disebutkan bahwa penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota DPRD II didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh partai politik tersebut di daerah Tingkat II. Sedangkan penghitungan suara untuk menentukan perolehan jumlah kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota DPRD I didasarkan atas seluruh hasil suara yang diperoleh partai politik tersebut di daerah Tingkat I. Penentuan calon terpilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada pengajuan pimpinan partai politik dengan mengacu kepada suara terbanyak yang diperoleh partai tersebut di tingkat masing-masing dan bila ada sengketa diselesaikan oleh PPD dan bila sengketanya masalah kriminal diselesaikan oleh kepolisian. Sedangkan pada UU No. 12 tahun 2003 pasal 105 disebutkan untuk penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari setiap partai politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Dari hasil penghitungan seluruh suara yang sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, ditetapkan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu

dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, DPRD II. Setelah ditetapkan angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP. Pada pemilu 2004 bila terjadi persengketaan diselesaikan oleh KPU dan bila KPU tidak dapat menyelesaikan maka diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

6. Partai Politik Peserta Pemilu

Pada tahun 1999 pemilihan umum diikuti oleh 48 partai politik sedang pada pemilihan umum tahun 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik. Adapun partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1999 antara lain : Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdatul Umat, Partai Nasionalis Indonesia-Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat

Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai GOLKAR, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah, Kekeluargaan, Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia.

Pada pemilu tahun 2004 partai politik yang ikut dalam pemilu ada 24 partai yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia baru, Partai Nasional Banteng kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai GOLKAR, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

C. Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Pemilu berdasar UU Pemilu No. 3/1999 dan UU Pemilu No. 12/2003 di Kabupaten Klaten.

1. Persamaan

Pada dasarnya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Klaten sama dengan pelaksanaan pemilu di daerah lain karena dasarnya adalah Undang-Undang pemilu yang berlaku pada saat itu. Persamaan itu dapat terlihat dari sistem pemilu yang digunakan maupun mengenai jumlah kursi dalam pemilihan umum 1999 dan 2004 yaitu 45 kursi dan perolehan masing-masing kursi dari setiap partai politik ditentukan oleh KPU.

Dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 terdapat pengawas yang ditugaskan mengawasi jalannya pemilu di Kabupaten Klaten. Setiap pengawas harus mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang –undangan pemilu, dan juga menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat pemilu berlangsung serta melaporkan hasil pengawasannya pada instansi yang berwenang. Pengawas pemilu antara tahun 1999 dan 2004 berbeda, perbedaannya yaitu pengawas pemilu tahun 1999 partai politik dominan dalam Panwaslak sedang pada pemilu tahun 2004 Panwaslu terdiri dari anggota non partai politik. Persamaan yang lain adalah mengenai hak memilih dalam pemilu antara tahun 1999 dan 2004 di mana yang berhak memilih adalah warga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Hal itu dilaksanakan di Kabupaten klaten sesuai dengan Undang-undang pemilu yang berlaku.

Pelaksanaan kampanye di Kabupaten Klaten dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku pada saat itu. Walaupun dalam Undang-Undang pemilu telah disebutkan bahwa pada saat kampanye peserta kampanye dilarang menghina partai lain dan melakukan kekerasan, namun dalam pelaksanaannya hal itu telah dilanggar. Banyak peserta kampanye yang melakukan tindakan yang dapat merugikan partai lain, seperti contohnya pada pemilu tahun 1999 peserta kampanye dari salah satu partai politik telah melempari rumah salah seorang kader dari Partai Amanat Nasional. Tidak hanya itu saja ketika Partai GOLKAR sedang mengadakan kampanye para peserta kampanye tersebut dihadang di jalan. Pada pemilu tahun 2004 pelaksanaan kampanye berjalan dengan lebih aman, tertib, dan lancar walaupun terdapat juga pelanggaran-pelanggaran.

2. Perbedaannya

Dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Klaten sistem yang digunakan antara tahun 1999 dan 2004 memang berbeda hal itu disesuaikan dengan Undang-Undang pemilu yang berlaku. Dalam pemilu tahun 1999 digunakan sistem proporsional di mana calon anggota DPRD yang dipilih ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan. Selain itu calon anggota DPRD yang dicalonkan ditentukan oleh partai politik adalah orang yang mempunyai kharisma tinggi dan cocok tanpa memperdulikan dari daerah mana asalnya atau mewakili kecamatan tertentu. Sedangkan pada pemilu tahun 2004 anggota DPRD yang dipilih harus berasal dari kecamatan tertentu

dan sekaligus mewakili kecamatan tersebut untuk duduk di DPRD yang biasa disebut dengan sistem distrik.

Lembaga yang dipilih oleh masyarakat di Klaten juga sama dengan yang termuat dalam Undang-Undang di mana pada pemilu tahun 1999 lembaga yang dipilih hanya meliputi DPR, DPRD I dan DPRD II sedang dalam pemilu tahun 2004 ditambah dengan memilih DPD secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang paling demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya sesuai dengan hati nuraninya.

Perbedaan yang lain adalah mengenai pendaftaran pemilih. Dalam UU No. 3/1999 pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa pendaftaran pemilih dilakukan secara aktif oleh pemilih artinya pemilih datang sendiri ke petugas pencacah untuk didaftar namun pada pelaksanaannya pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas. Berbeda dengan pemilu tahun 2004 pendaftaran pemilih dilakukan secara aktif dan pasif oleh pemilih. Dalam pelaksanaannya pendaftaran pemilih memang dilakukan oleh petugas dan bila ada warga yang belum terdaftar boleh mendaftar secara langsung kepada petugas.

Penyelenggara pemilu di Kabupaten Klaten pada tahun 1999 dan 2004 adalah KPU tetapi perbedaannya kalau pada pemilu tahun 1999 KPU diisi oleh partai dan pemerintah sedang pada pemilu tahun 2004 KPU diisi oleh individu-individu non partisan dan independen jadi pemerintah dan partai politik tidak lagi terlibat dalam KPU. Di Kabupaten Klaten partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 juga berbeda hal itu sesuai dengan peserta pemilu di pusat yang ikut.

Pada tahun 1999 pemilihan umum di Kabupaten Klaten diikuti oleh 37 partai politik sedang pada pemilihan umum tahun 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik. Adapun partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten antara lain : Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdatul Umat, Partai Nasioanalisis Indonesia-Front Marhaenis, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai GOLKAR, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah, Kekeluargaan, Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia.

Pada pemilu 2004 Partai politik yang ikut dalam pemilu ada 24 partai yaitu Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdatul

Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai GOLKAR, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor.

Partai yang ikut dalam pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten hanya 37 karena partai yang lainnya tidak ada calon yang terdaftar dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan pemilu tahun 2004 di mana semua partai politik ikut dalam pemilu sesuai dengan di pusat.

Pada tahun 1999 ada 7 partai besar yang memperoleh kursi di DPRD yaitu PDI-Perjuangan, PAN, Partai GOLKAR, PPP, PKB, Partai Keadilan dan PBB. Sedangkan Pada pemilu tahun 2004 ada 24 Partai yang ikut dalam pemilu dan yang memperoleh kursi di DPRD antara lain Partai Merdeka, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PDI-P, Partai GOLKAR.

BAB IV

**PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 1999 DAN 2004**

**A. Partai Golongan Karya Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum
tahun 1999**

1. Persiapan

Pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa, sebab baik corak, watak, maupun isi lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan pemilihan yang akan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Bagi organisasi peserta pemilu, pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting sebab dalam peristiwa tersebut terdapat kesempatan bagi ke 48 partai organisasi sosial politik untuk memperoleh suara pendukung dari rakyat.

Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1999 berusaha untuk tampil sebaik mungkin, karena pemilihan umum tahun 1999 merupakan pertama kali Partai GOLKAR ikut serta dalam pemilu tanpa adanya dukungan dari birokrasi dan PNS. Partai GOLKAR mengadakan persiapan-persiapan jauh hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya dengan tujuan agar dapat mengumpulkan massa pendukung Partai GOLKAR. Konsolidasi ini diharapkan dapat melakukan pembenahan dan penataan pengurus dan untuk mempersiapkan kampanye

yang akan dilakukan di Kabupaten Klaten. Secara umum yang dimaksud dengan konsolidasi adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana dan terpadu yang dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri lebih lanjut dalam rangka usaha mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan Partai GOLKAR Kabupaten Klaten adalah melakukan penggalangan baik melalui jalur teritorial maupun fungsional. Penggalangan jalur teritorial dilaksanakan oleh Komisariss dan Pembantu Komisariss GOLKAR di tingkat Kecamatan dan desa. Penggalangan teritorial dilakukan melalui sarasehan-sarasehan kader, apel-apel kader, dan dari rumah ke rumah. Sedangkan penggalangan fungsional dilakukan oleh para kader yang dilakukan melalui kegiatan organisasi fungsional seperti pemuda, wanita, ulama, tenaga kerja, dll.

Selain penggalangan teritorial dan fungsional Partai GOLKAR Kabupaten Klaten juga melakukan penggalangan umum berupa pengabdian pada masyarakat. Partai GOLKAR juga berusaha melakukan pemasyarakatan mengenai visi, misi dan flat-form GOLKAR Baru kepada seluruh jajaran kader dan masyarakat luas agar reformasi di dalam tubuh GOLKAR dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan harapan GOLKAR tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat. Partai GOLKAR juga membentuk satgas dalam rangka pengamanan dan pengawalan Partai GOLKAR selama kampanye⁴³.

⁴³ Wawancara Dengan F.X. Setyawan Anggota DPRD dari Partai GOLKAR tahun 2004 di Kabupaten Klaten, tanggal 17 Mei 2004.

2. Tahap Kampanye

Kampanye pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan pemilihan umum dalam usaha untuk mencari massa pendukung bagi para kontestan peserta pemilihan umum. Dalam masa itu kontestan pemilu diberi kesempatan mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatisannya sehingga rakyat tertarik untuk mendukungnya.

Ditinjau dari pelaksanaan kampanye pemilu tahun 1999 itu, waktu kampanye dimulai pada tanggal 19 Mei 1999 dan berakhir tanggal 4 Juni 1999. Adapun bentuk-bentuk kampanye yang digelar diantaranya adalah kampanye lapangan, pawai kendaraan, pemasangan poster, pamflet, penyebaran brosur. Partai GOLKAR dalam kampanye lapangan mempunyai pengaruh terhadap massa pemilih karena dijalankan dengan menyampaikan program-program yang memberi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kecuali itu Partai GOLKAR juga menampilkan tokoh-tokoh masyarakat yang pada umumnya mempunyai pengaruh besar dalam menjangkau massa.

Pelaksanaan kampanye Partai GOLKAR merupakan suatu kesempatan yang baik sebab dapat bertemu langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih. Dalam berkampanye organisasi partai politik dapat berbuat sedemikian rupa sejauh tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tanggung jawab dan hak pada waktu berkampanye diberikan sepenuhnya bagi kontestan pemilihan umum serta kebebasan menawarkan program partai politik. Dalam hal ini rakyat

mendapat kebebasan untuk menilai dan memilih partai yang dianggap baik tanpa adanya paksaan dari manapun dan siapapun.

Dalam berkampanye Partai GOLKAR juga memanfaatkan tokoh daerah dalam usaha menjaring massa pendukungnya. Cara itu dimanfaatkan sebab biasanya calon yang berasal dari daerah akan lebih mudah mendapat pendukung terutama masyarakat pendukung di daerahnya. Calon-calon daerah itu biasanya sudah mempunyai relasi dengan pemilih disekitar tempat tinggalnya. Hubungan yang baik dengan para pemilih itu dapat dimanfaatkan dalam rangka mencari pendukung.

Selain cara-cara di atas Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten juga mengikutsertakan peranan wanita dalam mempengaruhi massa pemilih. Walaupun dalam kampanye Partai GOLKAR sering mendapat masalah namun hal itu tidak membuat Partai GOLKAR patah semangat. Kampanye pemilihan umum tahun 1999 berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti meskipun mendapat tekanan-tekanan dari pendukung partai lain.

Setelah kampanye berakhir masyarakat dan peserta kontestan memasuki masa tenang dan tidak boleh mengadakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti melakukan kampanye, poster-poster, bendera politik, umbul-umbul harus diturunkan. Penurunan atribut partai politik dilakukan secara serentak, masyarakatpun ikut berpartisipasi

menurunkan atribut partai politik tersebut. Masa tenang dilakukan agar masyarakat dapat merenungkan partai politik yang dianggap baik⁴⁴.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten Klaten

Setelah kampanye selesai maka proses pemilu selanjutnya adalah pemungutan suara yang dilakukan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 di seluruh Indonesia. Pemilu tahun ini diikuti oleh 48 peserta partai politik. Pemungutan suara merupakan kegiatan puncak dalam pemilu sebab kegiatan ini mengikutsertakan rakyat dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Pemungutan suara melibatkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi DPR, DPRD I yang sekaligus akan mengisi keanggotaan MPR melalui pemilu, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemungutan suara menjadi tanggung jawab Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dilaksanakan oleh KPPS di tempat pemungutan suara. Dalam pemilu 1999 di Kabupaten Klaten terdapat 2.013 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. Banyak sedikitnya TPS di masing-masing kecamatan tergantung dari banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih. Penduduk di Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih pada pemilu tahun 1999 terdaftar sebanyak 742.213 orang⁴⁵

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 7 Juni 1999 yang dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Para petugas mempersiapkan segala keperluan dimulai dari persiapan Tempat Pemungutan

⁴⁴ Wawancara dengan Dedhari Sutrasno Anggota DPRD dari Partai GOLKAR tahun 2004 di Klaten, tanggal 17 Mei 2004.

⁴⁵ Dokumen dari DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 1999.

Suara (TPS) dan segala peralatannya di setiap dusun. Pemilihan umum agar terjamin kerahasiaannya maka dibuat bilik, selain itu juga dipersiapkan perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, sampul-sampul surat, surat suara, formulir-formulir, kantong plastik, alat pencoblos, lem, model BCI, BBI, BEI, tinta, dan lain-lain.

Dalam pemungutan suara juga dipersiapkan tenaga keamanan baik Hansip, Satgas dari partai politik, POLRI maupun TNI. Di tempat pemungutan suara juga terdapat saksi yang mengawasi jalannya pemungutan suara dan saksi ini berasal dari partai politik tertentu yang memang ditugaskan untuk melaporkan bila ada pelanggaran-pelanggaran pada saat pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS kemudian mengadakan penghitungan suara di TPS. Sebelum melakukan penghitungan suara para petugas mempersiapkan diri. Ketua KPPS meneliti kartu suara yang dikeluarkan dari kotak suara. Setelah semua siap maka petugas dengan disaksikan masyarakat dan para saksi memulai penghitungan suara. Ketua KPPS atau anggota membuka surat suara satu demi satu yang disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir. Petugas pencatat melakukan pencatatan di papan tulis dan hasilnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS serta anggota dan para saksi yang hadir.

Penghitungan suara ini bersifat terbuka untuk menghindari adanya kecurigaan masyarakat terhadap masyarakat yang satu dengan yang lain. Hal ini juga dilakukan karena para pemilih mempunyai hak untuk hadir dan

menyaksikan jalannya penghitungan suara. Keterbukaan tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya rekayasa hasil suara. Setelah selesai penghitungan suara dibuat Berita Acara dengan formulir model C dan C1 kemudian dikirim ke PPS. Setelah menerima laporan dari KPPS, langsung dilaporkan ke PPD I dengan sertifikat model D4 oleh PPD I dilaporkan ke PPI lewat BNI Klaten, kecuali hasil tersebut PPK juga mengirimkan hasil penghitungan suara lewat faximile dengan formulir model DA5.

4. Penetapan Hasil Pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten

Penetapan hasil pemilu pada dasarnya sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sesudah pemungutan suara selesai kemudian diadakan penghitungan suara di TPS. Dari PPS hasil tersebut dikirim ke PPS dan di PPS diadakan penghitungan suara. Hasil penghitungan suara dari PPS kemudian dikirim ke PPD II dan diadakan penghitungan suara lagi.

Dari hasil akhir penghitungan suara di Kabupaten Klaten Partai GOLKAR mendapat suara sebesar 82.203 dari jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 sebanyak 742.213 orang dengan jumlah suara yang sah 692.998.

Dalam pemilu 1999 Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten hanya mendapat 5 kursi. Dilihat dari hasil perolehan suara tersebut Partai GOLKAR mengalami penurunan jumlah suara dari pemilu tahun 1997 yang mana GOLKAR mendapat 24 kursi. Secara rinci perolehan suara Partai GOLKAR untuk DPR sebanyak 83.145 suara, dan untuk DPRD I sebanyak 82.681 suara sedangkan untuk DPRD II sebanyak 82.311. Jadi Partai GOLKAR pada tahun



1999 di Kabupaten Klaten mendapat 4 kursi dengan sisa suara 13.059 dan dari sisa suara tersebut Partai GOLKAR mendapat tambahan 1 kursi sehingga untuk DPRD II Partai GOLKAR mendapat 5 kursi⁴⁶. Adapun nama-nama calon dari Partai GOLKAR yang terpilih adalah K. Subagyo, Drs. Suparno, Drs. Anang Widayaka, Fx. Setyawan DS, Hengky Asnari Salim, SH⁴⁷. Untuk lebih jelasnya tentang rekapitulasi hasil pemilihan umum 1999 dapat dilihat pada lampiran 2,3,4 pada halaman 118,120,121.

Faktor yang menyebabkan Partai GOLKAR mengalami penurunan jumlah suara adalah bahwa sejak tahun 1998 GOLKAR ditetapkan sebagai partai politik yang sudah tidak ada lagi dukungan dari birokrasi dan PNS. Keadaan tersebut membuat Partai GOLKAR kehilangan pendukung yang pada waktu sebelumnya sangat mutlak berpengaruh dalam pemilu. Kekecewaan masyarakat akibat sikap dan perilaku penguasa Orde Baru yang arogan dan KKN yang diidentifikasi dengan GOLKAR juga sangat mempengaruhi penurunan jumlah suara Partai GOLKAR.

B. Partai Golongan Karya Kabupaten Klaten dalam Pemilu tahun 2004

1. Persiapan

Pemilihan umum tahun 2004 bagi bangsa Indonesia mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah perkembangan politik sebab untuk pertama kalinya pemilu tahun ini dilaksanakan secara langsung. Pemilu tahun 2004

⁴⁶ *Tabulasi Penghitungan Suara DPR, DPRD I, DPRD II, Kabupaten Klaten tahun 1999.*

⁴⁷ *Dokumen PPD tentang Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten, tanggal 29 Juli 1999.*

merupakan pemilu yang demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan.

Dalam menghadapi pemilu 2004 Partai GOLKAR mengadakan persiapan-persiapan untuk mendukung kelancaran pemilu. Persiapan yang dilakukan Partai GOLKAR antara lain :

Pertama, menyamakan visi dan persepsi politik Partai GOLKAR dalam upaya sukses konsolidasi partai yang meliputi konsolidasi kelembagaan, kaderisasi dan keanggotaan. Konsolidasi kelembagaan dilakukan dengan mempercepat penuntasan pembentukan jajaran kelembagaan partai sampai ketingkat desa/kelurahan. Selain itu juga membentuk POKKAR diseluruh TPS yang akan ditugaskan sebagai perangkat pelaksanaan pemilu ditingkat TPS. Konsolidasi kader dilakukan dengan menuntaskan pembentukan kader sampai ketingkat desa/kelurahan dan menugaskan kader secara efektif ke daerah-daerah. Sedangkan konsolidasi anggota dilakukan dengan melaksanakan pendataan ulang anggota Partai GOLKAR dan melakukan rekrutmen anggota baru khususnya pemilih pemula.

Kedua, mengembangkan dan mensosialisasikan sikap politik Partai GOLKAR yang demokratis, berbasis kebangsaan, religius dan merakyat melalui program penggalangan teritorial dan fungsional. Penggalangan teritorial dilaksanakan secara berjenjang melalui penugasan kader/fungsionaris pada daerah binaan masing-masing dengan sistem kerja pertemuan, kunjungan, sarasehan, dan liputan. Penggalangan teritorial juga dilakukan dengan memonitoring pelaksanaan tugas kader pada daerah binaan secara

berjenjang dan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil penggalangan. Dalam hal ini koordinator serta anggota POKKAR melakukan penggalangan secara langsung/door to door di mana setiap anggota dapat mempengaruhi sekurang-kurangnya 20 orang pemilih.

Penggalangan fungsional dilakukan dengan cara melaksanakan program kegiatan partai dalam rangka menggalang kelompok strategis khususnya pemuda dan wanita oleh masing-masing bagian/seksi pada pemimpin partai yang bersangkutan. Selain itu juga melaksanakan pertemuan intensif dengan para pinisepuh, penasehat, tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan fungsionaris dan simpatisan Partai GOLKAR. Cara yang lain adalah dengan melakukan dialog secara rutin dengan kelompok-kelompok kritis seperti LSM, unsur Perguruan Tinggi/mahasiswa, cendekiawan, seniman, serta pemberitaan redaksi media massa.

Ketiga, membangun opini dalam memulihkan citra Partai GOLKAR melalui berbagai berbagai kegiatan dan pendekatan yang dapat melahirkan simpati masyarakat secara luas dengan bantuan media massa. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mencermati isu-isu aktual yang berpengaruh terhadap Partai GOLKAR untuk memulihkan citra Partai agar tetap positif dikalangan masyarakat. Cara yang lain adalah menyiapkan dan menampilkan kader-kader partai yang mempunyai kemampuan, kharisma, daya tarik serta popularitas tinggi untuk dijadikan "Publik figur" dalam rangka menarik simpati masyarakat.

Keempat, membentuk BAPPILU di tingkat Kabupaten, Pokdalpilu di tingkat Kecamatan dan Satgaspilu di tingkat desa/kelurahan untuk menyusun program pemenangan pemilu secara terpadu. Selain itu juga membentuk POSKO pengendalian pemilu di tingkat Kabupaten dan Pos Simpul Komunikasi (POSIKOM) di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai pusat kegiatan pengendalian dan komunikasi selama proses pemilu berlangsung⁴⁸.

2. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye pada pemilu tahun 2004 dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Dewan Pimpinan Partai. Kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam pemilu sebab dalam kampanye tersebut terdapat kesempatan bagi OPP untuk bertemu secara langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih. Kampanye juga merupakan arena bagi para kontestan guna menanamkan pengaruhnya dan simpati dikalangan masyarakat untuk menjaring massa pendukungnya.

Kampanye pemilu tahun 2004 di Kabupaten Klaten dilaksanakan mulai tanggal 11 Maret sampai 1 April 2004. Selama berkampanye kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh partai politik pada dasarnya sama dengan yang sudah dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kegiatan berkampanye juga merupakan kesempatan bagi OPP untuk menyampaikan program-programnya pada masyarakat.

⁴⁸ Dokumen *Rapat Kerja Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten tahun 2003*.

Bentuk kegiatan kampanye Partai GOLKAR Kabupaten Klaten adalah meningkatkan frekuensi pertemuan dialogis dengan masyarakat, kampanye terbuka dan pengerahan massa. Kampanye terbuka dilakukan di lapangan terbuka dengan menghadirkan juru kampanye yang akan menyampaikan program-program partai pada masyarakat. Dalam berkampanye masing-masing OPP juga memasang poster, umbul-umbul dan juga bendera partai untuk menarik minat masyarakat sebagai pendukung partai berlambang Pohon Beringin. Partai GOLKAR juga melakukan pawai dengan menggunakan atribut partai dan dimeriahkan arak-arakan kendaraan bermotor yang knalpotnya dilepas sehingga terkesan berisik. Pawai merupakan kegiatan untuk menarik massa pendukung Partai GOLKAR.

Kampanye pemilihan umum tahun 2004 berjalan dengan lancar dan tertib bila dibandingkan dengan kampanye pemilu tahun 1999. Setelah kampanye berakhir masyarakat dan peserta kontestan memasuki masa tenang yaitu tanggal 2-4 April 2004. Dalam masa tenang masyarakat tidak boleh mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye. Dalam masa tenang masing-masing partai politik telah menunjukkan kebersamaan nyata dengan melakukan kegiatan bersama dalam rangka membersihkan tanda gambar, umbul-umbul, serta atribut partai yang lain⁴⁹.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Klaten

Kampanye pemilu tahun 2004 berakhir pada tanggal 1 April 2004. Setelah organisasi peserta pemilu saling bersaing menyampaikan program

⁴⁹ Wawancara dengan Dedhari Sutrasno Anggota DPRD dari Partai GOLKAR tahun 2004, tanggal 17 Mei 2004.

dalam kampanye, maka proses selanjutnya adalah masa tenang selama 4 hari. Masa tenang diberikan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk memikirkan kembali pilihannya dan meredakan ketegangan-ketegangan yang timbul selama kampanye. Dalam masa tenang organisasi partai politik tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan massa.

Setelah masa tenang berakhir maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Seluruh penduduk di Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada hari itu segera mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah TPS yang tersedia di Kabupaten Klaten sebanyak 2.031 yang tersebar di 401 kelurahan. Mengenai penempatan TPS itu sudah ada ketentuan dan aturan, dimana TPS tidak boleh berada di ruang gedung pemerintahan, sekolah dan diatur sebaik mungkin sehingga ada jaminan bagi pemilih untuk dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Untuk melaksanakan pemungutan suara maka di setiap TPS terdapat KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan umum menjadi tugas dan tanggungjawab PPS yang dilaksanakan oleh KPPS yang dibantu oleh petugas keamanan (HANSIP) di tempat pemungutan suara. Pada tanggal 5 April 2004 pemilih secara bergiliran diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah mendaftarkan

diri dengan memperlihatkan surat model C kepada KPPS. Ketua KPPS kemudian memberikan kepada pemilih empat kertas suara yang masing-masing untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Surat suara tersebut dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua KPPS di bagian luar yang ditentukan pada surat suara.

Pemilih yang telah menerima surat suara langsung menuju ke bilik pemberian suara untuk memberikan suaranya. Adapun cara dalam memberikan suara untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II pemilih harus mencoblos satu gambar partai satu nama calon yang dipilih. Sedangkan untuk memilih anggota DPD pemilih hanya mencoblos satu gambar dari calon anggota DPD. Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan tersebut dilipat kembali seperti semula sehingga bekas coblosannya tidak dapat dilihat. Pemilih kemudian menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat suaranya dalam keadaan terlipat kepada anggota KPPS dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah disediakan. Setelah waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB maka pemungutan suara ditutup.

Setelah pemungutan suara dinyatakan tutup atau kegiatan pencoblosan dinyatakan berakhir maka proses selanjutnya diadakan penghitungan suara. Dalam penghitungan suara semua aparat yang ada di TPS mempersiapkan diri sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. KPPS kemudian mulai mengadakan penghitungan suara yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing OPP yang ditunjuk sebagai pengawas dan memberitahukan kepada

ketua PPS apabila pelaksanaan penghitungan suara itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penghitungan suara masyarakat diperbolehkan hadir untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara dengan syarat tidak membuat kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya penghitungan suara.

5. Penetapan Hasil Akhir Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Klaten

Setelah kegiatan pemungutan suara berakhir maka proses selanjutnya adalah penghitungan kartu suara yang masuk. Dalam proses itu ketua KPPS mengumumkan jumlah surat undangan yang beredar, jumlah kartu suara yang diterima, dan jumlah kartu suara yang digunakan sebelum dimulai penghitungan suara.

Dari hasil akhir penghitungan suara dari pemilih sejumlah kurang lebih 745.626 orang dari 26 kecamatan, Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mendapat suara sebanyak 117.069. pada pemilu tahun 2004 di Kabupaten Klaten daerah pemilihannya dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu :

- a. Daerah pemilihan I, Kota/kawedanan yang terdiri dari Kecamatan Kebonarum, Ngawen, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Klaten Utara, Kalikotes, Wedi. Jumlah penduduk di daerah ini adalah 268.827 orang dan jumlah pemilihnya ada 161.303 orang. Jumlah suara sah partai politik adalah 153.985 sedang jumlah suara untuk Partai GOLKAR adalah 25.566 suara dengan BPP 15.399 sehingga Partai GOLKAR di daerah pemilihan I mendapat I kursi dengan sisa suara 10.168 dari sisa suara tersebut Partai

GOLKAR mendapat tambahan 1 kursi sehingga di daerah pemilihan I Partai GOLKAR mendapat 2 kursi.

- b. Daerah pemilihan II, Kawedanan Gondangwinangun yang terdiri dari Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, dan Karangnongko. Jumlah penduduk di daerah pemilihan ini ada 248.721 orang dan jumlah pemilihnya ada 149.231 orang. Jumlah suara yang sah di daerah pemilihan II adalah 141.474 suara dan jumlah suara untuk Partai GOLKAR adalah 18.703 suara dengan BPP 15.719 sehingga Partai GOLKAR di daerah pemilihan II mendapat 1 kursi dengan sisa suara 2.984 suara.
- c. Daerah pemilihan III, Kawedanan Jatinom yang meliputi Kecamatan Jatinom, Tulung, Polanharjo, Karanganom. Jumlah penduduk di daerah pemilihan ini ada 202.705 orang dan jumlah pemilihnya ada 121.629 orang. Jumlah seluruh suara sah partai politik di daerah pemilihan ini adalah 108.563 suara dengan BPP 15.509 dan Partai GOLKAR di daerah pemilihan ini mendapat suara sebanyak 20.897 suara sehingga Partai GOLKAR mendapat 1 kursi dengan sisa suara 5.388.
- d. Daerah pemilihan IV, yaitu Kawedanan Delanggu yang meliputi kecamatan Delanggu, Ceper, Wonosari, dan Juwiring. Jumlah penduduk di daerah pemilihan ini ada 225.923 orang dan jumlah pemilihnya ada 135.553 orang. Jumlah seluruh suara sah partai Politik di daerah ini adalah 128.491 dengan BPP 16.061. Partai GOLKAR di daerah pemilihan

ini mendapat suara sebanyak 21.911 dan mendapat I kursi dengan sisa suara 5.850.

- e. Daerah pemilihan V, yaitu kecamatan Karangdowo, Cawas, Bayat, Trucuk, Pedan. Jumlah penduduk di daerah pemilihan ini ada 296.491 orang dan jumlah pemilihnya ada 177.893. Jumlah suara yang sah di daerah pemilihan ini adalah sebanyak 155.710 dengan BPP 14.155. Partai GOLKAR di daerah pemilihan ini mendapat 29.997 suara sehingga mendapat 2 kursi dengan sisa suara 1.682⁵⁰. Untuk lebih jelasnya hasil penghitungan suara tersebut dapat dilihat pada lampiran 5,6,7,8,9,10 halaman 122,123,124,125,126,127.

Pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Klaten untuk Partai GOLKAR, calon di tingkat kecamatan dipilih oleh pimpinan desa sedang calon dari DPD dipilih oleh anggota yang bukan calon legislatif berdasar rapat yang dilakukan secara demokratis. Setelah diperoleh nama-nama calon yang terpilih langkah selanjutnya adalah penomoran nama calon yang didasarkan pada pengabdian, keaktifannya, dan tidak mempunyai masalah selama menjadi anggota DPD Partai GOLKAR. Nama-nama tersebut kemudian disahkan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR di Klaten. Adapun syarat calon anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk Partai GOLKAR adalah⁵¹ :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁰ *Tabulasi Penghitungan Suara DPR, DPRD I, DPRD II, Kabupaten Klaten tahun 2004.*

⁵¹ *UU pemilu No. 12 tahun 2004, hlm. 36.*

- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
 - f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
 - g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya.
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten.
 - k. Terdaftar sebagai pemilih.
 - l. Sudah menjadi anggota selama 5 tahun berturut-turut dan aktif dalam berbagai kegiatan.
 - m. Mempunyai jiwa pengabdian, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
- Adapun daftar nama calon dan calon yang terpilih dapat dilihat dalam lampiran 11,12 pada halaman 128,130.

Dalam pemilu tahun 2004 partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mendapat 7 kursi. Bila dibandingkan dengan pemilu tahun 1999 Partai GOLKAR telah mengalami kemajuan dengan tambahan 2 kursi yang mana

pada pemilu tahun 1999 hanya mendapat 5 kursi. Bagi Partai GOLKAR, para simpatisan kenaikan jumlah suara yang diperoleh Partai GOLKAR merupakan suatu kebanggaan yang sangat berarti karena ternyata masyarakat masih mempunyai kepercayaan terhadap Partai GOLKAR. Perolehan suara yang dicapai Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu 2004 tentunya berpengaruh besar terhadap posisi GOLKAR yang semakin meningkat pula di DPRD.

C. Perbedaan Tahap Persiapan dan Kampanye Partai GOLKAR pada Pemilu tahun 1999 dan 2004.

Pemilihan umum merupakan peristiwa yang sangat penting bagi negara dan parpol sehingga semua organisasi partai politik mempersiapkan sebaik mungkin dalam pemilu. Pada dasarnya persiapan pemilu pada tahun 1999 dan 2004 tidak banyak perbedaannya, bagi Partai GOLKAR Kabupaten Klaten langkah pertama yang dilakukan adalah konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya. Selain melakukan konsolidasi Partai GOLKAR Kabupaten Klaten juga melakukan penggalangan baik melalui jalur teritorial maupun fungsional. Hal yang paling penting dilakukan oleh Partai GOLKAR dalam menghadapi pemilihan umum tahun 1999 adalah pemasyarakatan mengenai visi, misi dan platform Partai GOLKAR Baru kepada masyarakat luas.

Perbedaan persiapan pemilu pada tahun 1999 dan 2004 adalah mengenai waktu persiapan, waktu persiapan, pada pemilu tahun 1999

persiapan pemilunya sangat singkat sehingga Partai GOLKAR tidak dapat melakukan konsolidasi dengan tuntas. Sedangkan pada pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR mempunyai waktu yang cukup dalam mempersiapkan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tahun 2004 lebih mempersiapkan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat karena pendidikan politik pada masyarakat masih sangat rendah sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan buruk mengenai Partai GOLKAR. Partai GOLKAR juga berusaha memulihkan citra Partai GOLKAR yang buruk dimata masyarakat.

Tahap yang juga penting dalam pemilu adalah tahap kampanye karena dengan kampanye para organisasi partai politik dapat menyalurkan program-program partainya. Bagi Partai GOLKAR Kabupaten Klaten bentuk kampanye pada pemilu tahun 1999 dan 2004 adalah sama, antara lain kampanye melalui rapat-rapat umum, sarasehan-sarasehan, pawai, kampanye lapangan, pemasangan poster dan dari rumah ke rumah. Demikian juga tema yang digunakan Partai GOLKAR pada pemilu tahun 1999 dan 2004 pada dasarnya intinya sama yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat serta memberantas KKN.

Kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat-rapat umum dilakukan di kantor DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dan dalam rapat tersebut juru kampanye menyampaikan program-program partai yang dapat menarik simpati massa. Selain melalui rapat kampanye juga dilakukan dengan sarasehan-sarasehan yaitu pertemuan tertutup yang dihadiri oleh massa yang

terbatas dan benar-benar simpatisan Partai GOLKAR sehingga lebih mencapai hasil yang optimal. Kampanye yang lain adalah kampanye lapangan yang sering menimbulkan bentrok antara peserta kampanye dari organisasi politik tertentu. Perbedaan yang lain adalah mengenai juru kampanye yang ditampilkan dalam pemilihan umum tahun 1999 dan 2004⁵².

D. Perbandingan Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004.

Perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 merupakan kekalahan yang amat menyedihkan, sebab perolehan suara pada tahun 1999 ini merupakan pertama kalinya Partai GOLKAR mengalami penurunan suara yang sangat drastis bila dibandingkan dengan pemilu tahun 1997 di mana pada waktu itu Partai GOLKAR mendapat 24 kursi di DPRD. Sedang dalam pemilu tahun 1999 partai GOLKAR hanya memperoleh suara sebesar 82.311 suara. Dengan jumlah suara yang diperoleh Partai GOLKAR pada pemilu tahun 1999 tersebut berhak menempatkan wakilnya di DPRD sebanyak 5 orang. Pada pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR mengalami kenaikan jumlah suara sebesar 117.069 suara. Kenaikan perolehan jumlah suara tersebut juga mempengaruhi jumlah kursi di DPRD di mana Partai GOLKAR mendapat 7 kursi. Perubahan perolehan jumlah suara antara lain dapat dilihat dari hasil perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004.

⁵² Wawancara Dengan Bapak Dedhari Sutrasno calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004, Tanggal 17 Mei 2004.

Tabel IV.1
Perbandingan Hasil Pemilu tahun 1999 dan 2004 Partai GOLKAR
Kabupaten Klaten untuk DPRD II

PEMILU	JUMLAH SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1999	692.998	82.311	5
2004	688.223	117.069	7

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004.

Pada pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten Partai GOLKAR mengalami penurunan jumlah suara disetiap kecamatan namun ada satu kecamatan yang Partai GOLKARnya menang yaitu Kecamatan Juwiring. Pada pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR mengalami kenaikan jumlah suara yang dibagi dalam 5 daerah pemilihan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Daerah pemilihan 1 mendapat 25.566 suara.
- b. Daerah pemilihan II mendapat 18.703 suara.
- c. Daerah pemillihan III mendapat 20.897 suara.
- d. Daerah pemilihan IV mendapat 21.911 suara.
- e. Daerah pemilihan V mendapat 29. 992 suara.

Dari perbandingan perolehan suara pada pemilu 1999 dan 2004 menunjukkan bahwa Partai GOLKAR mengalami kenaikan jumlah suara. Perolehan suara yang diperoleh Partai GOLKAR tersebut ternyata tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, hal itu dapat dilihat dari perolehan jumlah kursi yang hanya bertambah 2 kursi di DPRD. Bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau pada masa Orde Baru Partai GOLKAR selalu memperoleh suara terbanyak dan memperoleh kursi yang

paling banyak di DPRD. Penurunan jumlah suara pada pemilu tahun 1999 dan 2004 itu diakibatkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan berkurangnya pendukung Partai GOLKAR.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam arti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Dalam negara demokrasi rakyat mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya sehingga rakyat dapat ikut serta dalam proses penentuan kebijakan pemerintah. Partisipasi rakyat tersebut dapat disampaikan langsung melalui DPR yang merupakan wakil dari rakyat. Anggota DPR ada sebagai hasil dari adanya praktek demokrasi sebab dalam peristiwa tersebut rakyat dapat secara langsung memilih wakilnya. Bagi organisasi peserta pemilu hal tersebut merupakan kesempatan untuk mendapat dukungan dari rakyat. Pemilu juga merupakan kesempatan bagi Partai GOLKAR untuk menunjukkan bahwa Partai GOLKAR merupakan partai politik yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Sebagai wakil rakyat anggota DPRD dari Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dituntut mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Dari hasil pemilu pada tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa pemilu pada tahun ini sudah dilaksanakan berdasar demokrasi karena rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten pada Pemilu tahun 1999 dan 2004.

1. Keadaan geografis dan keadaan alam

Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten merupakan suatu wilayah yang terletak diantara Bujur Timur : 110.30-110.45 derajat dan Bujur Selatan 7.30-7.45 derajat. Wilayah Kabupaten Klaten Berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 3 dataran :

- a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah Utara meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- b. Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil Wilayah merupakan dataran Lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah Selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial di samping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Daerah Kabupaten Klaten

mempunyai ketinggian daerah 3,72% terletak di antara ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, 77,52% terletak di antara ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut, 12,76% terletak di antara ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut.

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 macam :

- a. Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
- b. Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
- c. Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes Sebelah selatan.
- e. Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Jogonalan.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kotamadya Surakarta yang dilewati jalan raya Yogya-Solo mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi sehingga tidak mustahil bahwa Kabupaten Klaten sudah dibentuk dan diresmikan menjadi kota Administratif Klaten oleh Menteri Dalam Negeri

pada tanggal 22 Oktober 1987. Di samping daerah mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kotamadya Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata seperti Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi plaosan, Makam Sunan Bayat, Makam Pujangga Ronggowarsito, Rowo Jombor, Deles Indah, dll.

Secara administratif Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 65.556 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kabupaten Klaten per kecamatan dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 131.

Dengan keadaan Kabupaten Klaten yang strategis dan subur penghasilan masyarakat dapat bertambah, sehingga rakyat dapat hidup dengan layak tidak kekurangan pangan, sandang maupun papan. Walaupun tidak semua penduduk di Kabupaten Klaten hidup makmur karena masih ada sebagian masyarakat yang hidup tidak mampu maka oleh pemerintah diberikan bantuan berupa beras. Keadaan geografi di Klaten perlu diketahui agar OPP dapat memprediksikan hasil perolehan suaranya dalam pemilu. Keadaan tersebut membawa pengaruh perolehan suara pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten. Misalnya dalam suatu daerah yang keadaan alamnya tidak baik seperti tanahnya yang tandus, sehingga menimbulkan kekeringan hal itu dapat dimanfaatkan oleh OPP termasuk juga Partai GOLKAR untuk meningkatkan perolehan jumlah suara dengan menyampaikan program-program yang sesuai dengan keadaan tersebut sehingga masyarakat dapat memilihnya.

2. Keadaan Sosial Masyarakat Kabupaten Klaten

Keadaan sosial masyarakat adalah suatu gambaran tentang kondisi sosial dari suatu masyarakat di wilayah tertentu, yang ditinjau dari jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Keadaan sosial di suatu wilayah pada pelaksanaan pemilu dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dan tolok ukur dari suatu parpol peserta pemilu untuk mendapat dukungan perolehan suara.

Penduduk di Kabupaten Klaten pada akhir tahun 1999 berjumlah 1.234.113 jiwa. Bila kepadatan penduduk ini dibandingkan dengan luas wilayah 65.556 ha, maka wilayah ini tergolong wilayah yang padat penduduk. Dari jumlah penduduk yang banyak itu terdiri dari kaum laki-laki berjumlah 598.091 jiwa sedangkan untuk perempuan berjumlah 636.022 jiwa. Dengan mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Klaten maka dapat dilihat jumlah yang diperbolehkan mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Jumlah penduduk yang mengikuti pemilu tahun 1999 sebesar 742.213 orang. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2004 adalah 1.277.297 yang terbagi laki-laki berjumlah 622.443 jiwa dan perempuan 654.854 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang ikut dalam pemilu tahun 2004 sebanyak 745.626 orang. Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten jika dilihat dari susunan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 132.

Perubahan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Klaten tahun 1999 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 mengalami kenaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah

satu aset yang penting dan merupakan salah satu potensi dalam peningkatan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat diperkirakan bahwa perolehan jumlah suarapun akan meningkat hal itu dapat dilihat pada jumlah pemilih yang memilih antara tahun 1999 dan 2004. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten dimenangkan oleh PDI-Perjuangan sedang Partai GOLKAR menduduki posisi ketiga setelah PAN. Dalam pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR mendapat perolehan suara yang cukup banyak sehingga menduduki posisi kedua setelah PDI-Perjuangan. Hal itu diakibatkan oleh adanya masyarakat yang beranggapan bahwa Partai GOLKAR adalah partainya Orde Baru yang menjadi penyebab krisis yang terjadi di Indonesia.

3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten

Keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu gambaran tentang kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dilihat dari jenis pekerjaan. Keadaan sosial ekonomi tersebut pada pemilu dipergunakan oleh parpol sebagai gambaran dari golongan ekonomi mana saja yang mendukungnya dalam pelaksanaan pemilu. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten mempunyai mata pencaharian sebagai petani maka perkembangan ekonomi di Kabupaten Klaten lebih diarahkan pada bidang pertanian walaupun pada bidang lain yang menjadi target pembangunan ekonomi seperti perdagangan, perbaikan jalan dan listrik. Pertanian di Kabupaten Klaten mencakup sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Sektor tanaman bahan makanan meliputi segala kegiatan yang menghasilkan komoditi makanan, sedangkan tanaman perkebunan meliputi segala jenis tanaman baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan dengan cara menyewa tanah rakyat seperti tebu dan tembakau. Dalam bidang peternakan meliputi segala kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak maupun unggas dengan tujuan dikembangbiakkan dan dijual. Bidang perikanan juga mencakup kegiatan pembenihan, penjualan bibit ikan. Selain pertanian dan peternakan, perdagangan juga merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di Kabupaten Klaten. Sektor perdagangan meliputi usaha dagang di rumah, pasar dan pertokoan. Di Kabupaten Klaten juga banyak terdapat perusahaan yang bergerak dalam bidang industri seperti industri logam, hasil pertanian dan kehutanan. Keadaan ekonomi tersebut harus diketahui oleh parpol-parpol karena dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat program-program kerja parpol sehingga mendapat suara dari rakyat. Melihat kenyataan yang ada sekarang ini bahwa kurang meratanya kesejahteraan dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia kurang dapat menampung tenaga kerja yang ada. Keadaan ini mempengaruhi eksistensi partai untuk memperoleh kursi terbanyak di pemerintahan. Penyebaran sumber daya sosial ekonomi Kabupaten Klaten yang kurang merata mempengaruhi pembentukan wilayah-wilayah yang menjadi kekuatan/basis Partai GOLKAR dan partai-partai lain, hal itu menjadi alasan Partai GOLKAR untuk menarik simpati massa dengan mengangkat pemerataan pembangunan dalam program partai.

4. Keadaan budaya masyarakat di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memiliki beberapa macam etnis, budaya yang berbeda-beda. Sebagai kelompok masyarakat mayoritas islam Kabupaten Klaten lebih mudah untuk mengembangkan budayanya namun tidak menutup kemungkinan dari kebudayaan masyarakat non islam lain seperti kristen, katholik, hindu, budha keadaan seperti itu tidak menjadikan masyarakat resah justru masyarakat selalu menunjukkan adanya toleransi agama. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemeluk agama di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada lampiran 15,16 halaman 133,134.

Dari hasil yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa penduduk di Kabupaten Klaten mayoritas beragama islam. Dari kondisi tersebut diprediksikan bahwa mereka akan memilih partai yang beraliran islam daripada partai lain. Namun kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Klaten dengan kondisi tersebut bukan partai islamlah yang memenangkan pemilu tetapi PDI-Perjuangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor agama tidak banyak mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan umum 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.

5. Faktor-faktor secara umum yang mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten Klaten pada tahun 1999 dan 2004.

Permasalahan yang internal yang dihadapi oleh Partai GOLKAR secara singkat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu struktural dan kultural. Yang dimaksud dengan permasalahan struktural adalah masalah yang menyangkut kelembagaan, organisasi atau format organisasi yang belum sepenuhnya sesuai

dengan dinamika perkembangan politik yang berlangsung sangat cepat. Sementara permasalahan kultural adalah permasalahan yang berkaitan dengan budaya politik seperti mentalitas, sikap atau perilaku yang sedikit banyak masih terpancang pada kultur lama. Sementara perubahan peta politik menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian seperlunya sehingga Partai GOLKAR baik secara kelembagaan maupun budaya politik dapat bersikap antisipatif dan proaktif menghadapi tantangan eksternal.

Sebelum reformasi, GOLKAR adalah partai yang tidak mandiri dan para anggota-anggotanya tidak dapat secara bebas dalam mengambil keputusan-keputusan organisasi. Keputusan-keputusan organisasi yang mendasar selalu ditentukan oleh mekanisme di luar organisasi partai, seperti Dewan Penasehat dan mekanisme kepemimpinan tiga jalur yaitu jalur A (ABRI), jalur B (Birokrat) dan jalur G (GOLKAR) serta perlu mendapat persetujuan dari Dewan Pembina/Dewan Pertimbangan/Dewan Penasehat. Pada awalnya Dewan pembina/Dewan Pertimbangan/Dewan penasehat dan mekanisme kepemimpinan Tiga Jalur merupakan bagian dari mekanisme kerja organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan. Namun, dalam perjalanannya mereka menjadi lembaga pengambil keputusan yang utama dan cenderung bersifat mutlak. Akibatnya terjadilah semacam kerancuan kelembagaan yang mengakibatkan ketidakmandirian GOLKAR sebagai partai politik.

Dalam MUNASLUB 1998 lembaga-lembaga lama tersebut dihapuskan dan pengambilan keputusan-keputusan organisasi dikembalikan kepada prinsip kedaulatan anggota serta prinsip menjaga demokrasi dan keterbukaan.

Namun, hal itu belumlah cukup untuk menjadikan Partai GOLKAR sebagai partai yang modern, karena untuk melangkah menjadi partai yang modern diperlukan pembenahan struktur organisasi agar setiap keputusan atau kebijakan dihasilkan melalui partisipasi aktif setiap anggota partai. Hal itu berarti struktur organisasi harus dapat menampung kepentingan-kepentingan para anggotanya.

Kedua permasalahan tersebut pasti harus segera diatasi agar GOLKAR segera tampil sebagai partai politik yang modern. Jika kedua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik maka GOLKAR akan lebih siap untuk menjadi partai yang berkuasa (*the ruling party*) dan bukannya sekedar menjadi *the ruler's party* atau *party of the ruler* seperti dalam paradigma lama (partai menguasai atau partai milik penguasa).

Adapun permasalahan eksternal yang dihadapi GOLKAR adalah bagaimana membangun citra partai. Harus diakui bahwa partai GOLKAR membawa stigma lama yang berat yakni dianggap sebagai pelanjut rezim lama, atau setidaknya dianggap sebagai partai yang menerima kesalahan-kesalahan yang dilakukan, masa lalu atau Orde Baru. Partai GOLKAR dikatakan sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap terpuruknya kehidupan bangsa pada masa Orde Baru. Karena anggapan-anggapan tersebut muncullah tuntutan agar partai GOLKAR dibubarkan.



6. Faktor-faktor khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR pada pemilu tahun 1999 di Kabupaten Klaten.

a. Faktor pendukung

Pertama, konsolidasi pengurus dapat dilaksanakan dari tingkat kabupaten sampai dengan desa dan khusus ditingkat desa kurang lebih 85% terbentuk. Konsolidasi ini sangat penting sebab akan menentukan kuat tidaknya suatu organisasi. Jika organisasi kuat maka akan dapat menghadapi tantangan dan berpengaruh pada hasil pemilu.

Kedua, komitmen publik dan dinamika pengurus DPD Partai GOLKAR tingkat II Klaten yang cukup respon dan aktif berorientasi ke bawah (desa/kelurahan). Partai GOLKAR Kabupaten Klaten pada dasarnya selalu memperhatikan masyarakat bawah sehingga dapat mendukung perolehan suara dalam pemilu.

Ketiga, dukungan masa tani dan wanita sebagai konstituent terbesar Partai GOLKAR. Dari dahulu Partai GOLKAR selalu memperhatikan kesejahteraan petani dan juga berusaha untuk mensejajarkan wanita dengan cara memberi kesempatan pada wanita untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Faktor penghambat

Pertama, rendahnya sumber daya manusia (kader kepengurusan) ditingkat kecamatan dan desa. Hal itu disebabkan karena persiapan yang cukup singkat sehingga menyebabkan Partai GOLKAR kurang siap dalam menjaring massa.

Kedua, banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1999 ternyata mengurangi dukungan masyarakat terhadap Partai GOLKAR dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999. Kekuatan partai lain, isu GOLPUT, perubahan wawasan politik masyarakat juga mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR. Dalam pemilu tahun 1999 Partai GOLKAR tidak dapat mempertahankan jumlah suara dengan latar belakang perubahan wawasan politik masyarakat, kekuatan pemimpin lokal partai dan motivasi politik telah memberikan kekuatan untuk mendukung Mega yang semula memberikan suaranya pada GOLKAR.

Ketiga, akibat adanya peraturan pemerintah No.12 tahun 1999 yang berdampak kurangnya kader pengurus dan adanya kader-kader GOLKAR yang menyeberang ke partai politik lain. Selain itu tidak adanya dukungan dari PNS karena PNS bersifat netral tidak lagi menjadi bagian dari Partai GOLKAR.

Keempat, adanya opini publik yang dibentuk oleh Mass Media yang kontra GOLKAR. Opini-opini tentang rendahnya citra GOLKAR telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol, sebagai akibat pemberitaan buruk terhadap perilaku kader-kader parpol baik di legislatif maupun eksekutif sehingga berdampak pada bertambahnya masyarakat GOLPUT. Selain itu juga disebabkan adanya gerakan-gerakan yang berindikasikan kekerasan dan intimidasi yang berakibat terciptanya situasi kecemasan rakyat sehingga takut untuk memilih GOLKAR.

7. Faktor-faktor khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR pada pemilu tahun 2004 di Kabupaten Klaten.

a. Faktor pendorong

Pertama, secara nasional infrastruktur organisasi yang sudah terbangun sejak lama dan tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan diseluruh wilayah tanah air serta manajemen yang relatif lebih mapan telah menempatkan Partai GOLKAR sebagai partai yang paling siap dan berpengalaman.

Kedua, kinerja positif para kadernya baik di FPG maupun pada posisi strategis lainnya. Ketersediaan dan kesiapan kader partai yang pada umumnya memiliki kualitas dan pengalaman tinggi ikut mengangkat citra positif Partai GOLKAR sebagai partai yang tidak mengutamakan individu.

Ketiga, masih adanya kader/simpatian Partai GOLKAR yang menduduki jabatan-jabatan strategis diberbagai sektor, baik di pusat maupun daerah yang merupakan potensi yang dapat didayagunakan. Keadaan seperti itu sangat menguntungkan Partai GOLKAR karena masyarakat cenderung mengutamakan figur seseorang yang dapat dijadikan teladan.

b. Faktor penghambat

Pertama, konsolidasi partai yang belum tuntas sesuai target, terutama dalam pembentukan dan pengisian perangkat organisasi sampai ketingkat desa termasuk pembentukan POKKAR ditingkat TPS. Demikian pula

keterlambatan kaderisasi dan tugas penggalangan yang sangat berpengaruh pada hasil pemilu 2004.

Kedua, keterbatasan sumber dana yang secara signifikan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan operasional partai. Pada pemilu-pemilu sebelumnya Partai GOLKAR tidak pernah mengalami kekurangan dana namun pada pemilu sekarang ini, di mana Partai GOLKAR sebagai partai yang mandiri telah menjadikan Partai GOLKAR kekurangan dana untuk pelaksanaan pemilu.

Ketiga, kurang lengkapnya data keorganisasian kader dan keanggotaan yang aktual dan akurat sejak GOLKAR menjadi Partai berakibat munculnya kesulitan dalam menyusun perencanaan pemenangan pemilu secara detail. Hal ini juga diakibatkan oleh kebiasaan sentralistis serta pendekatan yang "top down" belum sepenuhnya dapat dirubah sehingga penjabaran kebijakan partai ditingkat daerah berjalan lambat, banyak hambatan, kurang inisiatif dan membuat ketergantungan kepada jajaran di atasnya.

Keempat, secara nasional politisi yang terjadi akibat perbedaan persepsi dalam menyikapi status hukum ketua umum mempengaruhi kinerja partai dan menimbulkan gejala polarisasi di tubuh partai. Figur ketua umum Partai GOLKAR yang dianggap oleh masyarakat sebagai koruptor dan memakan uang rakyat kecil sangat mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.

BAB V

KESIMPULAN

Partai Golongan Karya adalah organisasi yang dibentuk untuk menghadapi eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada mulanya Partai Golongan Karya bernama SEKBER GOLKAR (Sekretariat Bersama Golongan Karya) yang merupakan federasi berbagai golongan kekaryaan. SEKBER GOLKAR dibentuk atas dorongan TNI pada tanggal 20 Oktober 1964 yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1971 SEKBER GOLKAR mengikuti pemilu pertama kali dan berhasil meraih suara terbesar dari rakyat maka sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik di Indonesia, maka pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. Selama perjalanannya GOLKAR telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru. Pada masa Orde baru GOLKAR selalu mendapat dukungan dari pemerintah, dengan kata lain program organisasi selalu disinkronkan dengan program pemerintah. Ciri GOLKAR pada masa Orde Baru yang pertama adalah dikenalnya sistem Tiga Jalur ("A" ABRI, "B" Birokrasi, "G" GOLKAR). Kedua, dominannya peranan lembaga Dewan Pembina. Ketiga, pengambilan keputusan selalu dari atas. Keempat, sangat menghindari pemungutan suara karena segala keputusan selalu didominasi oleh Dewan Pembina.

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan sejalan dengan pelaksanaan MUNASLUB GOLKAR pada bulan Juli 1998 GOLKAR menegaskan untuk memperbaharui dirinya sesuai dengan semangat reformasi. Ada beberapa yang

tidak lagi melekat dari GOLKAR masa lampau karena sekarang partai GOLKAR merupakan Partai yang terpisah dari pemerintah dan tidak lagi ada unsur PNS dan ABRI di dalamnya. Selain itu struktur kepemimpinan Partai GOLKAR era reformasi tidak lagi mempunyai institusi Dewan Pembina yang selalu mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Setelah SEKBER GOLKAR di pusat diresmikan, kemudian dibentuklah SEKBER GOLKAR di Kabupaten Klaten pada tahun 1964 dan sesuai dengan pusat pada tahun 1971 SEKBER GOLKAR dirubah menjadi GOLKAR. Selama perjalanannya GOLKAR di Kabupaten Klaten selalu mendapat dukungan terbesar dari rakyat namun sejak runtuhnya zaman Orde Baru dan munculnya zaman reformasi Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mengalami penurunan jumlah suara yang sangat besar.

Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Klaten disesuaikan dengan UU No. 3/1999 dan UU No. 12/2003 karena Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dari segi normatif pelaksanaan pemilu di Kabupaten Klaten memang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentang pemilu tetapi dari segi pelaksanaan di Kabupaten Klaten pelaksanaan pemilu tersebut tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu dapat dilihat dari segi pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye dan juga dari partai politik peserta pemilu di Kabupaten Klaten. Persamaan yang ada pada Undang-Undang pemilu No. 3/1999 dan Undang-Undang No. 12/2003 adalah sistem pemilu yang dilaksanakan dengan sistem proporsional untuk memilih anggota DPR/DPRD, daerah pemilihan dan jumlah

kursi, hak memilih dan juga pelaksanaan kampanye. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa untuk pemilu tahun 2004 sistem pemilihannya ditambah dengan sistem distrik untuk memilih anggota DPD, lembaga yang dipilih, pendaftaran pemilih, penyelenggaraan pemilu, penetapan hasil pemilihan umum, partai politik peserta pemilu.

Pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, beberapa upaya telah dilakukan oleh Partai GOLKAR untuk memenangkan pemilu antara lain dengan melakukan konsolidasi partai, pembentukan panitia pemenangan pemilu, pembentukan program kerja, kaderisasi, pendirian posko, pemasangan pamflet, umbul-umbul, menyiapkan juru bicara kampanye dan tempat kampanye. Usaha yang dilakukan Partai GOLKAR Kabupaten Klaten pada pemilu tahun 1999 ternyata tidak berhasil memenangkan perolehan suara Partai GOLKAR karena hanya mendapat 82.311 suara dari 692.998 suara sah partai politik di Kabupaten Klaten. Dari perolehan suara tersebut partai GOLKAR hanya mendapat 5 kursi di DPRD II.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 Partai GOLKAR juga melakukan berbagai persiapan termasuk penggalangan teritorial maupun fungsional, membentuk kader-kader pemenangan pemilu, membentuk BAPPILU, pemasangan umbul-umbul, pamflet, bendera partai, pemilihan juru bicara dalam kampanye dan pemilihan tempat kampanye. Usaha-usaha yang dilakukan Partai GOLKAR ternyata berhasil meningkatkan perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten sebesar 117.069 suara dari 688.223 suara sah partai politik. Dari perolehan suara yang diperoleh pada pemilu tahun 2004 partai GOLKAR berhak menempatkan wakilnya di DPRD tingkat II sejumlah 7 orang.

Kekalahan Partai GOLKAR pada pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografi, keadaan sosial masyarakat, keadaan sosial ekonomi, agama, selain itu adalah adanya tuduhan bahwa Partai GOLKAR sebagai penyebab krisis di Indonesia, adanya kekecewaan masyarakat terhadap sikap dan perilaku penguasa Orde Baru yang arogan dan KKN yang diidentifikasi dengan Partai GOLKAR, adanya stigma GOLKAR sebagai pendukung utama Orde Baru yang masih melekat sampai saat ini. Walaupun Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten mengalami kekalahan namun keberhasilan Partai GOLKAR mendapat kursi di DPRD patut disyukuri. Perolehan suara Partai GOLKAR tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu konsolidasi pengurus yang dapat dilakukan dengan baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa, adanya komitmen politik dan dinamika pengurus DPD partai GOLKAR tingkat II Klaten yang cukup respon dan aktif berorientasi ke bawah.

Demikianlah uraian dari penulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

AD/ART Partai Golongan Karya tahun 1998-2004 : Klaten

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten Masa Bakti 1998-2004 : Klaten

Hasil Konferensi Partai GOLKAR 1998 : DPD Partai GOLKAR Klaten

Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Paripurna IV Partai GOLKAR tahun 2000 : DPD Partai GOLKAR Klaten

Hasil Rapat Kerja Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 2003

Data Perolehan Suara 1999 dan 2004 : KPU Kabupaten Klaten

Data BAPEDA Kabupaten Klaten dalam tahun 1999 dan 2004 : Klaten

Undang-Undang Pemilu No. 3 tahun 1999, 1999, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Pemilu No. 12 tahun 2003, 2003, Bandung : Citra Umbara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BUKU

Budiarjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.

_____, 1982, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta: PT Gramedia.

Gafar, Afan, dkk, 1993, *Golkar Dan Demokratisasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi Dan Kebijakan (PPSK).

Gottschalk, Louis, 1986, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugrohonotosusanto), Jakarta: UI-Press.

Kansil, C.S.T, 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum* (Sarana Demokrasi Pancasila) Jakarta: IND: CO.

Karim, Rusli, 1883, *Perjalanan Partai Poltik Di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, Jakarta: Rajawali.

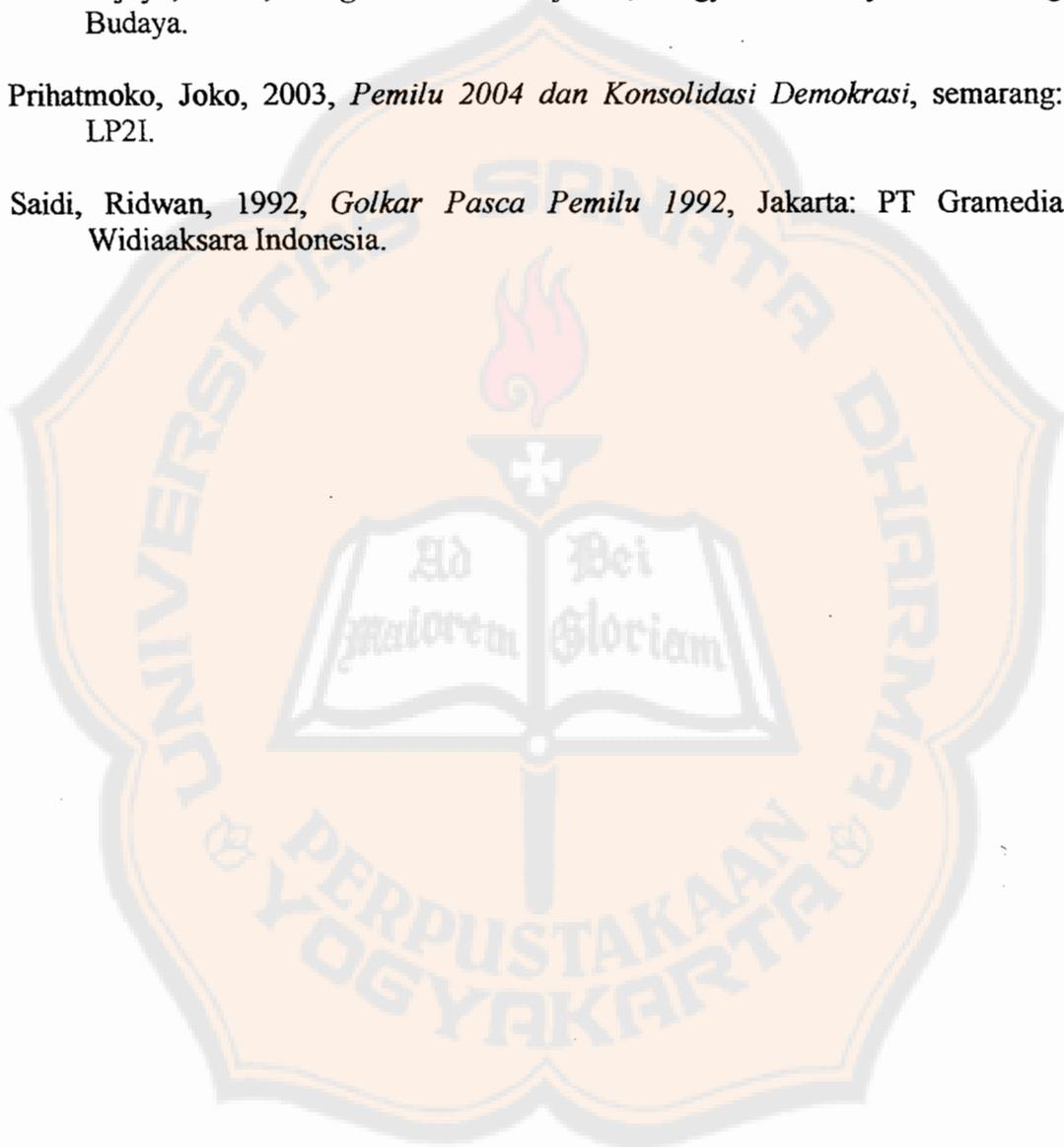
_____, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kristiadi. J, dkk, 1997, *Pemilihan Umum 1997 (Perkiraan Harapan Dan Evaluasi)*, Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Prihatmoko, Joko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I.

Saidi, Ridwan, 1992, *Golkar Pasca Pemilu 1992*, Jakarta: PT Gramedia Widiaakarsa Indonesia.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1 : *silabus*

SILABUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Semester : 3/5

Alokasi Waktu : 6 jam

I. Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perkembangan partai politik di Indonesia
II. Hasil Belajar	Memahami Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.
III. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten. 2. Membandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasar UU Pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12 tahun 2003. 3. Menjelaskan perolehan suara Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004. 4. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.
IV. Tujuan Pembelajaran	<p>Siswa mampu menjelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di kabupaten Klaten. 2. Perbandingan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasar UU pemilu No.3/1999 dan UU No.12/2003. 3. Perolehan suara Partai GOLKAR Kabupaten

	<p>Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004.</p> <p>4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di kabupaten Klaten.</p>
<p>V. Langkah Pembelajaran</p>	<p>Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua tahap :</p> <p>1. Pengalaman pembelajaran di luar kelas.</p> <p>a. Melalui studi pustaka (buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan majalah)sehubungan dengan (1) sejarah terbentuknya partai GOLKAR di kabupaten Klaten, (2) perbandingan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU Pemilu No.3/1999 dan UU Pemilu No.12/2003, (3) perolehan suara Partai GOLKAR kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004, (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.</p> <p>b. Guru membagi 4 kelompok tugas yaitu (1) kelompok sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten, (2) kelompok perbandingan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU pemilu No.3/1999 dan UU Pemilu No. 12/2003, (3) kelompok perolehan suara Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004, (4) kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.</p>

	<p>c. Lembar kerja siswa</p> <p>1. Judul: Sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.</p> <p>Isi Laporan : - Sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di pusat</p> <ul style="list-style-type: none">- Sejarah terbentuknya Partai GOLKAR di Klaten.- Keanggotaan Partai GOLKAR di kabupaten Klaten. <p>Kesimpulan : Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten terbentuk pada tahun 1964 yaitu setelah diresmikannya Partai GOLKAR di pusat.</p> <p>2: Judul : Pebandingan pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 dan 2004 berdasar UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003.</p> <p>Isi Laporan : - Persamaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003.</p> <ul style="list-style-type: none">- perbedaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003.- Persamaan dan perbedaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003.
--	--

	<p>Kesimpulan : OPersamaan pemilu tahun 1999 dan 2004 adalah sistem pemilihan untuk anggota DPR/DPRD, daerah pemilihan, jumlah kursi, hak memilih, dan pelaksanaan kampanye sedangkan perbedaannya adalah sistem pemilihan untuk memilih anggota DPD, lembaga yang dipilih, pendaftaran pemilih, penyelenggara pemilu, penetapan hasil pemilu, dan partai politik peserta pemilu.</p> <p>3. Judul : Perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004.</p> <p>Isi laporan : - Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999.</p> <p>- Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 2004.</p> <p>- Perbedaan tahap persiapan dan kampanye pada pemilu tahun 1999 dan 2004.</p> <p>- Perbandingan hasil perolehan suara pada pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.</p>
--	---

	<p>Kesimpulan : Partai GOLKAR Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 mendapat 82.311 suara dengan perolehan kursi di DPRD 5 buah sedangkan pada pemilu tahun 2004 mendapat 117.069 suara sehingga Partai GOLKAR berhak menempatkan wakilnya di DPRD sebanyak 7 kursi.</p> <p>4. Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten.</p> <p>Isi laporan : - Faktor-faktor secara umum yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten. - Faktor-faktor secara khusus yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten.</p> <p>Kesimpulan : Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR dapat dilihat dari keadaan geografi, ekonomi, sosial masyarakat maupun agama, ada juga</p>
--	--

	<p>faktor lain yang mempengaruhi perolehan suara yaitu adanya stigma bahwa Partai GOLKAR adalah Partai yang menyebabkan krisis di Indonesia dan masih ada unsur-unsur Orde Baru di dalam partai.</p> <p>2. Pembelajaran di kelas</p> <p>a. Apersepsi Penyampaian materi yang akan dicapai.</p> <p>b. Kegiatan inti Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah terbentuknya partai GOLKAR di Kabupaten Klaten. 2. Perbandingan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasar UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003. 3. Perolehan suara Partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai GOLKAR dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten klaten.
<p>VI. Sarana dan Sumber Pembelajaran</p>	<p>a. sarana pembelajaran: Peta politik Kabupaten Klaten.</p> <p>b. Sumber pembelajaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afan Gafar, dkk, 1993, <i>GOLKAR dan</i>

	<p><i>Demokratisasi di Indonesia</i>, Yogyakarta : Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan.</p> <p>2. Miriam Budiarjo, 1982, <i>Partisipasi dan Partai Politik</i>, Jakarta : Gramedia.</p> <p>3. Ridwan Saidi, 1993, <i>GOLKAR pasca pemilu tahun 1992</i>, Jakarta : Gramedia Widiaakarsa Indonesia.</p> <p>4. UU Pemilu No.3 tahun 1999 dan UU pemilu No.12 tahun 2003.</p> <p>5. Dokumen KPU tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten tentang hasil pemilu.</p>
<p>VII. Penilaian</p>	<p>a. Kognitif: Penilaian yang dilakukan melalui test tertulis dalam bentuk essay.</p> <p>b. Afektif : Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar dan diskusi di kelas.</p> <p>c. Porto folio: Guru mengumpulkan seluruh kegiatan siswa baik individual maupun kelompok dalam map yang telah disediakan.</p>
<p>VIII. Evaluasi</p>	<p>1. Jelaskan sejarah terbentuknya partai GOLKAR di Kabupaten Klaten ?</p> <p>2. Bandingkan pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan 2004 berdasarkan UU pemilu No.3/1999 dan UU pemilu No.12/2003 ?</p> <p>3. Jelaskan perolehan suara Partai GOLKAR di Kabupaten Klaten dalam pemilu tahun 1999 dan 2004 ?</p> <p>4. Deskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai GOLKAR pada tahun 1999 dan 2004 di Kabupaten Klaten ?</p>

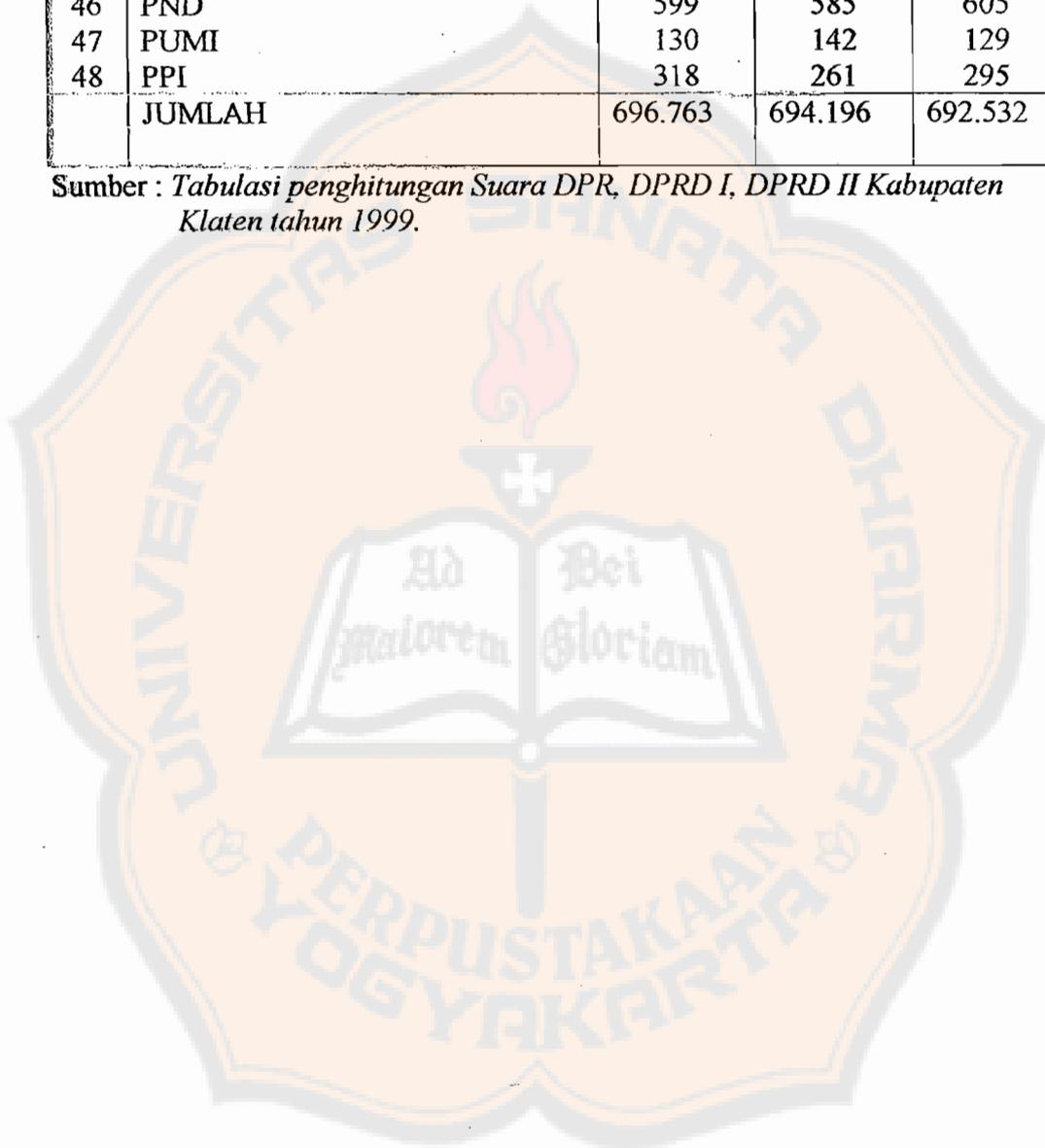
Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemilu 1999

NO	OPP	DPR	DPRD I	DPRD II
1	PIB	558	570	620
2	KRISNA	1.167	1.052	1.179
3	PNI	3.274	3.285	3.406
4	PADI	241	204	253
5	KAMI	3.312	3.277	3.247
6	FUI	561	603	623
7	PKU	468	429	457
8	P. Masyumi Baru	678	641	646
9	PPP	34.360	34.524	34.879
10	PSII	853	806	881
11	PDI-Perjuangan	387.234	385.721	383.820
12	PAY	664	646	619
13	PKM	270	291	286
14	PDKB	2.000	2.213	2.604
15	PAN	94.295	93.124	92.938
16	PRD	871	913	773
17	PSII 1905	386	386	363
18	PKD	821	889	911
19	PILAR	152	144	151
20	PARI	233	275	256
21	MASYUMI	2.952	2.970	2.995
22	PBB	7.578	7.351	7.184
23	PSP	222	219	236
24	PK	8.676	8.937	8.881
25	PNU	591	633	636
26	PNI Front Marhaenis	4.079	3.987	3.990
27	IPKI	1.739	1.594	1.568
28	P. Republik	341	345	320
29	PID	211	196	195
30	PNI Masa Marhaen	3.151	3.186	3.165
31	MURBA	138	162	163
32	PDI	1.697	1.653	1.657
33	P.GOLKAR	83.145	82.681	82.311
34	PP	1.356	1.334	1.322
35	PKB	39.485	39.943	39.925
36	PUDI	453	411	491
37	PBN	565	594	566
38	MKGR	477	474	539
39	PDR	1.070	1.106	1.143
40	P. Cinta Damai	523	564	591

41	PKP	3.167	3.244	3.128
42	SPSI	328	326	303
43	PNBI	774	735	706
44	PBI	186	172	172
45	SUNI	414	398	404
46	PND	599	585	605
47	PUMI	130	142	129
48	PPI	318	261	295
	JUMLAH	696.763	694.196	692.532

Sumber : Tabulasi penghitungan Suara DPR, DPRD I, DPRD II Kabupaten Klaten tahun 1999.



Lampiran 3

Perolehan Suara 7 Partai Besar per kecamatan di Kabupaten Klaten pada Pemilu tahun 1999

No	Kecamatan	PDI-P	PAN	P. GOLKAR	PKB	PPP	PK	PBB
1	Klaten Utara	12.611	5.044	2.790	694	833	358	481
2	Klaten Tengah	13.293	3.599	3.768	392	1.312	630	176
3	Klaten Selatan	12.303	3.390	3.118	463	1.159	316	174
4	Wedi	16.085	5.070	3.737	679	610	557	139
5	Kebonarum	6.109	2.062	1.084	846	401	55	102
6	Ngawen	9.215	6.948	1.931	2.851	2.735	377	357
7	Kalikotes	10.919	2.500	1.940	469	1.046	471	103
8	Jogonalan	20.471	3.805	2.728	1.352	650	439	172
9	Prambanan	13.766	3.252	3.481	1.229	414	354	177
10	Manisrenggo	12.764	1.649	2.537	2.812	506	86	121
11	Karangnongko	11.428	1.272	1.769	4.059	403	112	90
12	Kemalang	10.328	1.487	1.683	2.602	428	28	68
13	Gantiwarno	12.945	2.728	2.284	627	563	338	85
14	Jatinom	17.051	4.509	4.043	904	1.843	411	303
15	Karanganom	12.742	3.824	3.098	2.935	2.375	226	258
16	Polanharjo	12.688	3.480	3.480	959	1.232	383	703
17	Tulung	14.351	3.444	3.244	1.630	2.583	242	271
18	Delanggu	13.498	4.343	3.607	1.298	689	330	328
19	Juwiring	15.849	3.652	5.294	1.518	3.743	362	670
20	Wonosari	20.807	3.067	4.246	1.324	1.891	321	775
21	Ceper	17.998	5.288	3.021	5.148	1.355	286	264
22	Pedan	16.699	2.588	2.684	1.247	1.424	186	177
23	Trucuk	23.830	5.257	5.459	1.610	2.024	469	287
24	Karangndowo	17.193	2.010	4.009	819	1.233	234	258
25	Cawas	20.584	4.024	3.963	958	1.429	416	429
26	Bayat	18.287	4.646	3.345	500	1.998	894	218
	Jumlah	383.820	92.938	82.311	39.925	34.879	8.881	7.184

Sumber : *Evaluasi pemilu tahun 1999 DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten, 12 Juli 1999.*

Lampiran 4

Perolehan Suara Partai GOLKAR TK II Klaten

NO	KECAMATAN	SUARA SAH	SUARA P.GOLKAR
1	JUWIRING	33.146	5.294
2	KLATEN TENGAH	24.824	3.768
3	KARANGDOWO	27.154	4.009
4	POLANHARJO	24.159	3.500
5	DELANGGU	25.162	3.607
6	PRAMBANAN	24.553	3.481
7	KLATEN SELATAN	22.393	3.118
8	TRUCUK	41.177	5.459
9	WEDI	28.795	3.737
10	JATINOM	31.244	4.043
11	WONOSARI	34.259	4.246
12	TULUNG	27.814	3.244
13	KARANGANOM	26.669	3.098
14	KLATEN UTARA	24.188	2.790
15	MANISRENGGO	22.086	2.537
16	CAWAS	34.113	3.903
17	GANTIWARNO	21.607	2.940
18	KALIKOTES	18.373	1.940
19	BAYAT	31.822	3.345
20	PEDAN	26.493	2.684
21	KEBONARUM	11.521	1.084
22	KEMALANG	18.428	1.683
23	CEPER	35.106	3.021
24	JOGONALAN	31.744	2.728
25	KARANGNONGKO	20.617	1.769
26	NGAWEN	25.551	1.931
	JUMLAH	692.998	82.303

Sumber : *Evaluasi Pemilu tahun 1999 DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten, 12 Juli 1999.*

Lampiran 5

Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004 Kabupaten Klaten

NO	PARTAI	DPR RI	DPRD I	DPRD II
1	PNI-Marhaenis	4.337	4.183	4.913
2	PBSD	1.911	1.692	1.246
3	PBB	6.095	5.921	6.212
4	P. Merdeka	7.196	7.189	9.170
5	PPP	27.340	27.524	29.072
6	PPDK	1.158	913	984
7	PPI-Baru	1.982	1.977	2.576
8	PNBK	8.072	7.437	8.459
9	P. Demokrat	28.773	27.232	22.076
10	PKPI	3.208	2.288	505
11	PPDI	1.586	2.811	1.542
12	PPNUI	547	514	130
13	PAN	115.598	114.838	113.434
14	PKPB	6.324	6.328	6.544
15	PKB	42.098	43.198	46.870
16	PKS	41.300	43.706	41.511
17	PBR	4.650	3.013	2.693
18	PDI-Perjuangan	259.742	263.036	261.851
19	PDS	6.903	7.176	6.018
20	P.GOLKAR	108.265	107.176	117.069
21	P.Patriot Pancasila	1.148	704	280
22	PSI	2.155	1.818	1.819
23	PPD	909	854	1.020
24	P. Pelopor	2.670	2.248	2.229
	JUMLAH	683.965	683.776	688.223

Sumber : *Tabulasi Penghitungan Suara DPR, DPRD I, DPRD II, Kabupaten Klaten tahun 2004.*

Lampiran 6

Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004

Daerah pemilihan I

Jumlah seluruh suara sah partai politik : 153.985

Jumlah kursi : 10

BPP : 15.399

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI
1	PNI-Marhaenis	1.218	0
2	PBSD	322	0
3	PBB	1.983	0
4	P. Merdeka	250	0
5	PPP	6.434	0
6	PPDK	146	0
7	PPI-Baru	582	0
8	PNBK	1.507	0
9	P. Demokrat	6.447	0
10	PKPI	330	0
11	PPDI	-	-
12	PPNUI	-	-
13	PAN	38.116	3
14	PKPB	705	0
15	PKB	7.474	1
16	PKS	9.667	1
17	PBR	323	0
18	PDI-Perjuangan	49.007	3
19	PDS	2.937	0
20	P.GOLKAR	25.566	2
21	P.Patriot Pancasila	-	-
22	PSI	258	0
23	PPD	360	0
24	P. Pelopor	353	0
	JUMLAH	153.983	10

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2004

Lampiran 7

Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004

Daerah pemilihan 2

Jumlah seluruh suara sah partai politik : 141.474

Jumlah kursi : 9

BPP : 15.719

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI
1	PNI-Marhaenis	1.792	0
2	PBSD	341	0
3	PBB	1.265	0
4	P. Merdeka	457	0
5	PPP	3.089	0
6	PPDK	185	0
7	PPI-Baru	242	0
8	PNBK	2.850	0
9	P. Demokrat	3.464	1
10	PKPI	-	-
11	PPDI	920	0
12	PPNUI	-	-
13	PAN	18.411	1
14	PKPB	2.009	0
15	PKB	17.250	1
16	PKS	7.876	1
17	PBR	373	0
18	PDI-Perjuangan	59.213	4
19	PDS	1.279	0
20	P.GOLKAR	18.703	1
21	P.Patriot Pancasila	-	-
22	PSI	495	0
23	PPD	304	0
24	P. Pelopor	956	0
	JUMLAH	141.474	9

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2004

Lampiran 8

Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004

Daerah pemilihan 3

Jumlah seluruh suara sah partai politik : 108.563

Jumlah kursi : 7

BPP : 15.509

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI
1	PNI-Marhaenis	425	0
2	PBSD	323	0
3	PBB	1.193	0
4	P. Merdeka	120	0
5	PPP	6.857	1
6	PPDK	183	0
7	PPI-Baru	1.152	0
8	PNBK	2.403	0
9	P. Demokrat	3.477	0
10	PKPI	-	-
11	PPDI	-	-
12	PPNUI	-	-
13	PAN	20.378	1
14	PKPB	355	0
15	PKB	6.029	0
16	PKS	7.014	1
17	PBR	251	0
18	PDI-Perjuangan	37.092	3
19	PDS	-	-
20	P.GOLKAR	20.897	1
21	P.Patriot Pancasila	-	-
22	PSI	108	0
23	PPD	128	0
24	P. Pelopor	178	0
	JUMLAH	108.563	7

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2004



Lampiran 9

Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004

Daerah pemilihan 4

Jumlah seluruh suara sah partai politik : 128.491

Jumlah kursi : 8

BPP : 16.061

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI
1	PNI-Marhaenis	517	0
2	PBSD	260	0
3	PBB	508	0
4	P. Merdeka	-	-
5	PPP	7.785	1
6	PPDK	84	0
7	PPI-Baru	317	0
8	PNBK	1.092	0
9	P. Demokrat	5.298	0
10	PKPI	175	0
11	PPDI	-	-
12	PPNUI	-	-
13	PAN	20.626	1
14	PKPB	986	0
15	PKB	8.214	1
16	PKS	7.027	1
17	PBR	927	0
18	PDI-Perjuangan	51.542	3
19	PDS	916	0
20	P.GOLKAR	21.911	1
21	P.Patriot Pancasila	-	-
22	PSI	-	-
23	PPD	83	0
24	P. Pelopor	223	0
	JUMLAH	128.491	8

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2004

Lampiran 10

Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Klaten tahun 2004

Daerah pemilihan 5

Jumlah seluruh suara sah partai politik : 155.710

Jumlah kursi : 11

BPP : 14.155

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI
1	PNI-Marhaenis	961	0
2	PBSD	-	-
3	PBB	1.263	0
4	P. Merdeka	8.343	1
5	PPP	4.907	0
6	PPDK	386	0
7	PPI-Baru	283	0
8	PNBK	607	0
9	P. Demokrat	3.390	0
10	PKPI	-	-
11	PPDI	622	0
12	PPNUI	130	0
13	PAN	15.903	1
14	PKPB	2.489	0
15	PKB	7.903	1
16	PKS	9.927	1
17	PBR	819	0
18	PDI-Perjuangan	64.997	5
19	PDS	886	0
20	P.GOLKAR	29.992	2
21	P.Patriot Pancasila	280	0
22	PSI	958	0
23	PPD	145	0
24	P. Pelopor	519	0
	JUMLAH	155.710	11

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 Mei 2004

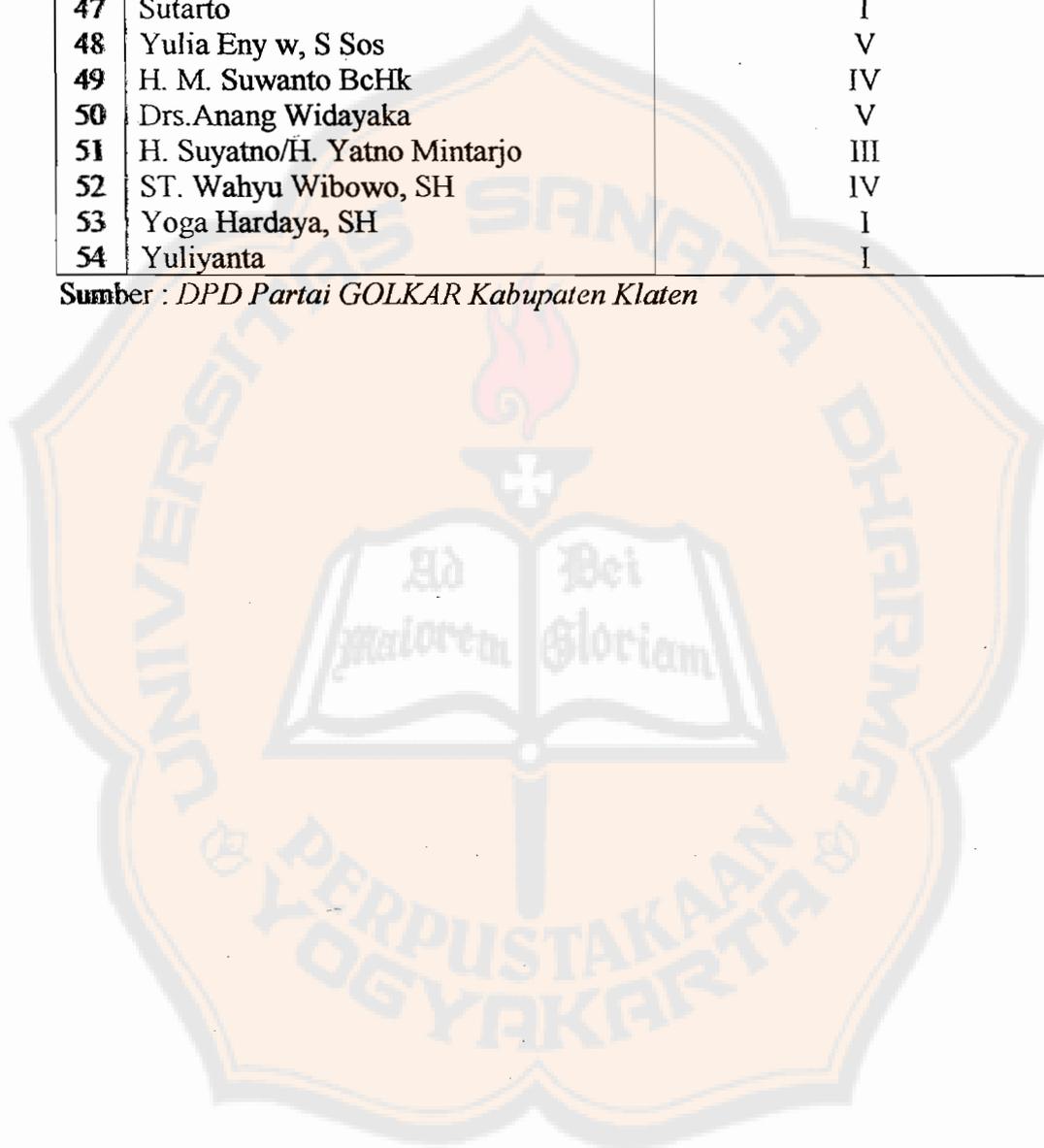
Lampiran 11

Daftar Calon Legislatif Partai GOLKAR Kabupaten Klaten Tahun 2004

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN
1	Agus Anggito, SE, MM	V
2	Dedhari Sutrasno	II
3	Dendy Rudiyanto	V
4	Djuminten	V
5	Drs. H. Djuardi, BBA	II
6	Dwi Lestari, SE	I
7	Endah Nur Ayomi	I
8	Endang Poediasoeti, BSc	I
9	Singgih Iswardani	II
10	Gigih Dasa Nugraha	V
11	Hengki Asnari salim, SH	V
12	Ir.Heru Siswandono	II
13	Jarot Estu Sambodo, SH	I
14	P. Joko Santoso, SH	III
15	Ir.Anjas Prihantono	IV
16	Ir. Kusdiby	II
17	H. Marghono Notopertomo,SPd	I
18	Muhyidin	I
19	Mujianto	V
20	Nurdi Agus Sutanto	I
21	Pandu Sujadmoko,SE	III
22	Priyono	II
23	Purwanto	IV
24	Ratimin	III
25	Retno Sri Hariyani,SPd	IV
26	Sadini	III
27	Samana	IV
28	Dra. Satyani Adyarti	III
29	Fx.Setyawan DS	I
30	Siti Chotijah, SP	II
31	Siti Sumarsih Sugito	IV
32	Dr. Slamet Sugiarto	V
33	H. Soeharboen	II
34	Sri Rahayu, SH	III
35	Sri Sulastri, SH	V
36	Sri Wening, SPd	I
37	Sriati	V
38	Sugito	V
39	H. Suhirlan	IV
40	Dra. Sumiwati	II
41	Sunarni Sulaiman	I

42	Sunarwan	IV
43	Drs. Suparno	III
44	H. Suratman	V
45	Sutanto Heru Tjahyono	II
46	Sutardjo	II
47	Sutarto	I
48	Yulia Eny w, S Sos	V
49	H. M. Suwanto BcHk	IV
50	Drs.Anang Widayaka	V
51	H. Suyatno/H. Yatno Mintarjo	III
52	ST. Wahyu Wibowo, SH	IV
53	Yoga Hardaya, SH	I
54	Yuliyanta	I

Sumber : DPD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten



Lampiran 12

Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Partai GOLKAR Kabupaten Klaten tahun 2004

NO	DAERAH PEMILIHAN	NAMA CALON TERPILIH
1	I	FX. Setyawan. DS
2	I	Yoga Hardaya, SH
3	II	Dedhari Sutrasno
4	III	Drs. Suparno
5	IV	H. Suwanto. BcHK.
6	V	Asnari Salim, SH Al Hengky
7	V	Drs. Anang Widayaka

Sumber : KPU Kabupaten Klaten tanggal 8 mei 2004.



Lampiran 13

Luas Wilayah Kabupaten Klaten per kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH
1	Prambanan	2.443
2	Gantiwarno	2.564
3	Wedi	2.438
4	Bayat	3.943
5	Cawas	3.447
6	Trucuk	3.381
7	Kalikotes	1.300
8	Kebonarum	966
9	Jogonalan	2.670
10	Manisrenggo	2.696
11	Karangnongko	2.674
12	Ngawen	1.697
13	Ceper	2.445
14	Pedan	1.917
15	Karangdowo	2.923
16	Juwiring	2.979
17	Wonosari	3.114
18	Delanggu	1.878
19	Polanharjo	2.384
20	Karanganom	2.406
21	Tulung	3.200
22	Jatinom	3.553
23	Kemalang	5.166
24	Klaten Selatan	1.444
25	Klaten Tengah	890
26	Klaten Utara	1.038
	JUMLAH	65.556

Sumber : Dipertanhor, DDA Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004

Lampiran 14

Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 1999 dan 2004

NO	KECAMATAN	1999		2004	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Prambanan	20.453	22.471	21.548	23.379
2	Gantiwarno	18.385	21.055	18.833	21.384
3	Wedi	25.492	27.434	26.362	28.390
4	Bayat	27.900	30.033	31.040	32.635
5	Cawas	30.726	32.537	31.855	32.885
6	Trucuk	37.433	38.405	39.016	39.669
7	Kalikotes	16.416	16.771	17.788	18.554
8	Kebonarum	9.902	10.907	10.144	11.053
9	Jogonalan	27.330	28.178	28.260	28.858
10	Manisrenggo	18.689	20.595	19.611	21.355
11	Karangnongko	17.160	18.764	18.351	19.552
12	Ngawen	20.756	21.662	21.458	22.175
13	Ceper	30.187	31.527	31.032	32.169
14	Pedan	22.373	23.410	23.561	24.311
15	Karangdowo	24.707	26.014	25.185	26.400
16	Juwiring	28.737	30.475	29.910	31.567
17	Wonosari	28.881	31.379	29.529	32.004
18	Delanggu	21.722	22.314	21.890	22.443
19	Polanharjo	21.942	23.667	22.064	23.194
20	Karanganom	23.596	24.968	23.951	25.137
21	Tulung	26.135	27.317	26.757	27.713
22	Jatinom	25.363	28.155	27.479	29.139
23	Kemalang	16.287	17.365	16.888	17.716
24	Klaten Selatan	18.646	19.745	19.412	20.442
25	Klaten Tengah	20.328	21.379	21.013	22.164
26	Klaten Utara	18.455	19.495	19.506	20.566
	JUMLAH	598.091	636.022	622.443	654.854

Sumber : BAPEDA Kabupaten Klaten dalam tahun 1999 dan 2004

Lampiran 15

Penduduk menurut kecamatan dan pemeluk agama di Kabupaten Klaten tahun 1999

NO	KECAMATAN	ISLAM	KATHOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA
1	Prambanan	39.440	1.621	1.401	353	109
2	Gantiwarno	35.122	1.138	2.550	88	542
3	Wedi	47.102	2.036	2.704	1.084	-
4	Bayat	56.340	304	1.306	-	73
5	Cawas	60.960	981	1.123	-	199
6	Trucuk	74.391	895	517	2	33
7	Kalikotes	32.147	288	726	8	18
8	Kebonarum	14.789	1.611	2.554	-	1.855
9	Jogonalan	46.099	2.522	4.674	-	2.213
10	Manisrenggo	38.164	834	197	1	88
11	Karangnongko	30.528	1.527	1.443	1	2.425
12	Ngawen	39.529	1.474	594	-	821
13	Ceper	57.428	973	3.095	32	366
14	Pedan	43.013	1.609	681	22	458
15	Karangdowo	47.609	1.710	382	-	1.020
16	Juwiring	57.536	529	878	-	269
17	Wonosari	57.594	1.347	1.259	22	38
18	Delanggu	41.068	893	1.809	25	241
19	Polanharjo	44.738	352	478	32	9
20	Karanganom	47.927	362	275	-	-
21	Tulung	52.615	458	379	-	-
22	Jatinom	51.901	568	441	-	608
23	Kemalang	32.355	398	697	-	202
24	Klaten Selatan	31.541	2.873	3.140	17	820
25	Klaten Tengah	31.483	4.846	5.019	181	178
26	Klaten Utara	29.756	3.361	3.557	22	984
	JUMLAH	1.140.995	35.780	41.879	1.890	13.569

Sumber : BAPEDA : Klaten dalam tahun 1999

Lampiran 16

Penduduk menurut kecamatan dan pemeluk agama di Kabupaten Klaten tahun 2004

NO	KECAMATAN	ISLAM	KATHOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA
1	Prambanan	42.374	1.287	1.014	99	153
2	Gantiwarno	36.152	1.479	2.047	539	-
3	Wedi	49.913	1.883	2.323	633	-
4	Bayat	62.613	683	362	11	6
5	Cawas	62.728	788	1.044	180	-
6	Trucuk	77.369	844	452	14	6
7	Kalikotes	35.214	408	694	19	7
8	Kebonarum	14.790	1.748	2.768	1.891	-
9	Jogonalan	48.581	1.679	5.034	1.822	2
10	Manisrenggo	39.696	917	227	124	2
11	Karangnongko	32.553	1.503	1.508	2.339	-
12	Ngawen	35.602	3.183	4.059	760	29
13	Ceper	59.192	1.488	2.395	126	-
14	Pedan	46.018	1.346	368	13	127
15	Karangdowo	48.889	1.778	299	619	-
16	Juwiring	60.892	406	63	116	-
17	Wonosari	58.799	1.502	1.214	15	3
18	Delanggu	41.516	808	1.821	163	25
19	Polanharjo	44.258	391	567	42	-
20	Karanganom	48.312	498	278	-	-
21	Tulung	54.010	286	174	-	-
22	Jatinom	54.856	325	807	630	-
23	Kemalang	33.344	489	629	142	-
24	Klaten Selatan	32.523	2.906	3.704	694	27
25	Klaten Tengah	32.079	5.329	5.455	106	208
26	Klaten Utara	33.980	2.973	2.704	384	31
	JUMLAH	1.186.253	36.927	42.010	11.481	626

Sumber : BAPEDA : Klaten dalam tahun 2004



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072 / 235 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi Ijin dari Dekan FKIP Univ. Sanata Dharma Yogyakarta, Tanggal 9 Agustus 2004, Nomor 956/Pnl/Kajur/PIPS/VIII/2004.
 - 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- Nama : Sri Lestafi
- Pekerjaan/Mahasiswa : FKIP Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
- Alamat : Ketekan, Gantiwarno, Klaten
- Penanggung Jawab : Drs. Adisusilo, J.R.
- Judul / Tujuan : Untuk membuat skripsi dengan judul " PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 DAN 2004 DI KABUPATEN KLATEN "
- Lokasi : Kabupaten Klaten
- Lamanya : 3 bulan (11 Agustus s/d 11 November 2004)



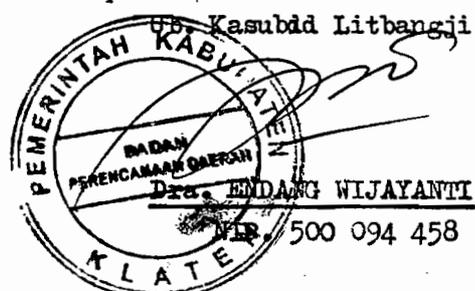
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.
3. Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 11 Agustus 2004

An. **BUPATI KLATEN**
Kepala Badan Perencanaan Daerah



Tembusan Surat ini dikirim kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kab. Klaten
2. Ketua DPD Golkar Kabupaten Klaten
3. Ketua KPU Kabupaten Klaten
4. Dekan FKIP Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip